



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

RANHIR RENSTRA 2025 - 2029

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



KATA PENGANTAR

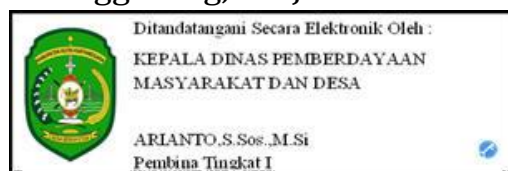
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan teknokratis yang menjabarkan arah kebijakan pembangunan jangka menengah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2045 serta Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

Dokumen ini disusun berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, serta menjadi implementasi visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara 2025–2029. Penyusunan Renstra mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dan Petunjuk Teknis Renstra OPD melalui Surat Nomor: P-355/BAPPEDA/000.7.2/11/2024.

Melalui dokumen ini, diharapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki arah pembangunan yang lebih terukur dan terstruktur dalam meningkatkan kualitas layanan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta berkontribusi nyata dalam mewujudkan visi Kabupaten Kutai Kartanegara: “Kutai Kartanegara Idaman Terbaik: Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.”



Tenggarong, 08 Januari 2026



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI..... 2

DAFTAR TABEL..... 4

DAFTAR GAMBAR 5

BAB I PENDAHULUAN..... 6

 1.1. Latar Belakang..... 6

 1.2. Dasar Hukum..... 8

 1.3. Maksud dan Tujuan..... 10

 1.4. Sistematika Penulisan..... 11

BAB II..... 13

 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 13

 2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah..... 13

 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 17

 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 21

 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan..... 28

 2.1.5. Mitra Perangkat Daerah 29

 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah..... 30

 2.2.1. Permasalahan 30

 2.2.2. Isu Strategis 33

BAB III..... 37

 3.1. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 37

 3.2. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 38

 3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 42

 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 51

BAB IV..... 58

 4.1 Uraian Program 58

 4.2 Uraian Kegiatan..... 59

4.3 Uraian Subkegiatan	60
4.4 Uraian Subkegiatan Dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	118
4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	126
4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.....	126
BAB V	127

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Distribusi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Berdasarkan Penugasan	17
Tabel 2. 2 Distribusi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Berdasarkan tingkat Pendidikan	18
Tabel 2. 3 Distribusi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Berdasarkan Pangkat/Golongan/Ruang	18
Tabel 2.4 Daftar Inventaris Barang dan Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	19
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara	22
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara	26
Tabel 2.7 Perumusan Permasalahan DPMD	31
Tabel 2.8 Isu Strategis Perangkat Daerah.....	35
Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra DPMD.....	41
Tabel 3. 2 Penahapan Renstra	47
Tabel 3. 3 Perumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	51
Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara	62
Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	97
Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	119
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	126
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	126

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Kutai Kartanegara..... 16

Gambar 3.1 Konsep Renstra DPMD 39

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra
DPMD..... 40

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
DPMD..... 61

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan jangka panjang Indonesia periode 2025– 2045 diarahkan untuk mewujudkan “Visi Indonesia Emas 2045” sebagai negara berdaulat, maju, adil, dan makmur. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan kontribusi nyata dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah melalui perencanaan strategis yang selaras dengan arah kebijakan nasional.

Di tingkat daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Dengan adanya Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 23 Juni 2025, dokumen ini sekaligus merupakan wujud komitmen dalam mendukung pencapaian visi daerah “Kutai Kartanegara Idaman Terbaik: Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata, dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”.

Secara khusus, Renstra DPMD memiliki kontribusi strategis terhadap pencapaian misi pembangunan daerah, antara lain:

1. Mendukung misi peningkatan tata kelola pemerintahan dan profesionalisme aparatur melalui penguatan kapasitas pemerintah desa dan aparatur desa;
2. Mengakselerasi misi pengembangan ekonomi non-ekstraktif berbasis pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif melalui pemberdayaan BUMDes, UMKM desa, serta inovasi desa;
3. Memperkuat misi pembangunan kewilayahan yang berkeadilan melalui fasilitasi pemerataan pembangunan desa dan peningkatan partisipasi masyarakat; dan
4. Memastikan bahwa kebijakan, program, dan layanan DPMD dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan secara inklusif, partisipatif, dan berkeadilan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga desa, termasuk perempuan, pemuda, lansia, penyandang disabilitas, kelompok miskin, dan kelompok rentan lainnya.

Kondisi pembangunan desa di Kabupaten Kutai Kartanegara masih menghadapi tantangan antara lain ketimpangan

pembangunan antarwilayah, keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur desa, serta perlunya penguatan kelembagaan dan ekonomi desa. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan desa juga perlu ditingkatkan agar pembangunan berjalan inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas pemerintahan desa, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendorong kemandirian desa melalui penguatan kelembagaan, pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat, dan pengembangan potensi ekonomi desa. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan untuk mewujudkan desa yang berdaya, mandiri, serta mampu mengelola sumber daya secara bijaksana untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Dalam pelaksanaannya, DPMD bertindak sebagai penggerak koordinasi lintas sektor pada tataran pembangunan desa, memastikan bahwa kebijakan, program, dan fasilitasi yang diberikan selaras dengan prioritas pembangunan desa serta mendorong sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Penyusunan Renstra DPMD Tahun 2025–2029 menjadi penting sebagai dokumen penjabaran RPJMD yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan target kinerja lima tahunan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Perencanaan pembangunan ke depan menempatkan penguatan kapasitas desa dan pemanfaatan potensi lokal sebagai prioritas utama untuk mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam kerangka tersebut, DPMD berkomitmen meningkatkan peran masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa, termasuk di wilayah dengan karakteristik khusus seperti wilayah pesisir yang menjadi bagian dari kewilayahan desa.

Renstra ini disusun berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, dengan tetap memperhatikan dinamika lingkungan strategis dan aspirasi

masyarakat desa. Adapun tahapan penyusunan Renstra ini, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renstra PD;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD;
3. Penyampaian Rancangan Renstra PD;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD;
5. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD; dan
6. Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Renstra PD.

Dengan demikian, Renstra DPMD bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Renstra ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 melalui penguatan kapasitas desa, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pengembangan potensi lokal secara berkelanjutan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 mengacu pada peraturan perundang-undangan dan regulasi perencanaan pembangunan yang berlaku, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
 - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan;
 - 9) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025–2029;
 - 10) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - 11) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

- (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 142);
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 No. 163);
 - 13) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 No. 180);
 - 14) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; dan
 - 15) Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

I.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa selama periode 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berpedoman pada RPJMD. Renstra ini juga dimaksudkan untuk memperkuat kontribusi DPMD dalam upaya mendukung pencapaian tujuan RPJMD, khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, dan pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi. Selanjutnya, Renstra ini berfungsi agar pelaksanaan urusan dapat berjalan terarah, terukur, sinergis, dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan provinsi dan nasional.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah:

- 1) Mengidentifikasi capaian kinerja pembangunan, permasalahan, dan isu strategis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) Menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang

pemberdayaan masyarakat dan desa untuk periode 5 (lima) tahun kedepan;

- 3) Menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran;
- 4) Menyediakan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, target, dan pagu indikatif;
- 5) Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan DPMD;
- 6) Menyediakan acuan dalam pengukuran kinerja melalui indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK); dan
- 7) Menjadi dasar pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- **Bab I: Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan latar belakang penyusunan dokumen Renstra, dasar hukum yang menjadi landasan, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan dokumen secara keseluruhan.

- **Bab II: Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis**

Berisi uraian mengenai profil pelayanan DPMD, tugas dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya yang tersedia, pencapaian kinerja sebelumnya, kelompok sasaran dan mitra perangkat daerah. Bab ini juga merangkum permasalahan utama dan isu-isu strategis yang relevan dengan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

- **Bab III: Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

Bab ini menjabarkan tujuan dan sasaran strategis DPMD untuk lima tahun ke depan, strategi pencapaian, serta arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut.

- **Bab IV: Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Memuat daftar program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator kinerja, target indikator tahunan, serta estimasi pagu pendanaan. Bab ini juga menyajikan logika keterkaitan antara tujuan, sasaran, outcome, dan output serta penentuan program/kegiatan/subkegiatan. Pada bab ini dimuat juga program prioritas pembangunan daerah disertai kegiatan dan subkegiatan. Selain itu disajikan juga Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci DPMD.

- **Bab V: Penutup**

Berisi penegasan kembali pentingnya dokumen Renstra sebagai acuan strategis pelaksanaan tugas DPMD, serta penjelasan umum mengenai kaidah pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Melaksanakan perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b) Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c) Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;
- e) Mengkoordinasikan penyusunan laporan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f) Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- g) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri atas:

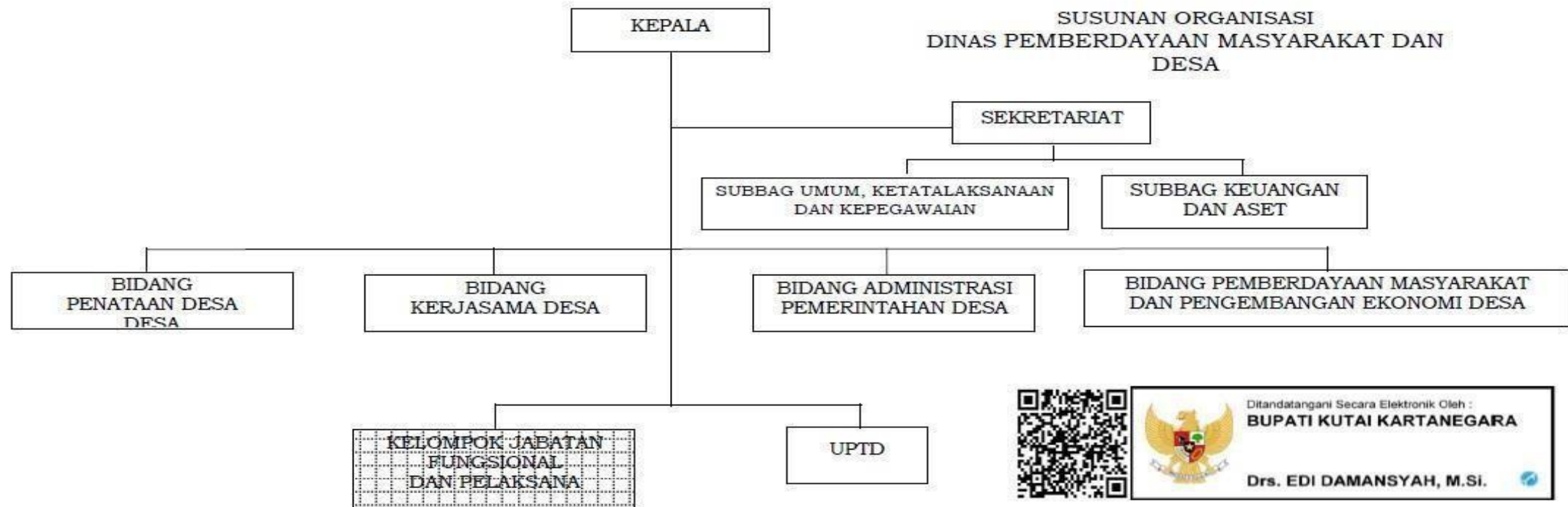
- a) Kepala Dinas, memiliki tugas mengkoordinasikan perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi, serta melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
- b) Sekretaris, mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi, serta mengkoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan urusan umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan penganggaran, keuangan dan aset.

Sekretaris membawahkan dan mengkoordinasikan:

- 1) Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian, mempunyai tugas menghimpun dan mengumpulkan data, serta merencanakan, melaksanakan, memonitoring, dan mengevaluasi urusan umum, ketatalaksanaan, dan kepegawaian;
- 2) Subbagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas menghimpun dan mengumpulkan data, serta merencanakan, melaksanakan, memonitoring, dan mengevaluasi urusan keuangan dan aset;
- c) Bidang Penataan Desa, mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan Penataan Desa, Penyediaan Pelayanan dan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa;
- d) Bidang Kerjasama Desa, mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan Kerjasama Desa;
- e) Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Desa, Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, serta Aparatur dan Perkembangan Desa;
- f) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa, mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Kemasyarakatan, Kapasitas urusan Kelembagaan,

Lembaga dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;

- g) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana, mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) UPTD, dipimpin oleh Kepala UPTD yang Ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.



Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung oleh sumber daya yang meliputi sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran. Ketersediaan dan kualitas sumber daya ini sangat menentukan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah pegawai pada DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara hingga tahun 2024 tercatat sebanyak 151 orang. Berdasarkan jenjang pendidikan dan kompetensi, terdapat variasi kualifikasi yang memerlukan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan untuk mendukung pelayanan yang profesional dan adaptif.

1) Distribusi SDM berdasarkan unit kerja:

Berdasarkan data pada tabel di bawah memberikan gambaran proporsi jumlah pegawai pada masing- masing unit kerja, jumlah terbanyak pegawai berada di Sekretariat, dan terkecil pada bidang Penataan Desa dan Bidang Kerjasama Desa, jumlah pada bidang tersebut dibawah rata-rata pegawai (21 Orang) yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Namun kondisi jumlah pegawai pada masing-masing unit kerja disesuaikan pada kebutuhan berdasarkan kondisi dan beban kerja.

Tabel 2. 1 Distribusi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Berdasarkan Penugasan

No	Bidang Kerja	Jumlah (orang)	Laki-Laki	Perempuan	%
1	Sekretariat	46	21	25	31,94
2	Bidang Penataan Desa	21	12	9	14,58
3	Bidang Kerjasama Desa	23	14	9	15,97
4	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	26	16	10	18,05
5	Bidang Kelembagaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Adat	28	10	18	19,44
Jumlah		144	73	71	100%

Sumber: Sub Bagian Umum Tata Laksana dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun 2025.

2) Distribusi SDM berdasarkan tingkat Pendidikan:

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki jumlah total ASN 144 orang, yang terdiri atas 73 Orang laki-laki dan 71 Orang perempuan dengan rentang pendidikan paling rendah SMA dan Paling Tinggi Strata Dua (S2).

Tabel 2. 2 Distribusi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Berdasarkan tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Laki-Laki	Perempuan	%
1	S2	12	8	4	8,33
2	S1	74	38	36	51,39
3	SLTA	58	27	31	19,44
Jumlah		144	73	71	100

Sumber: Sub Bagian Umum Tata Laksana dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025.

3) Distribusi SDM berdasarkan Pangkat/Golongan/Ruang:

Distribusi pegawai berdasarkan data pada tabel pangkat/golongan/ruang memberikan gambaran bahwa yang menunjukkan bahwa Sebagian besar pegawai memiliki pengalaman kerja yang cukup berdasarkan masa kerja golongan. Hal ini memungkinkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dapat adaptif menghadapi dinamika perubahan tata kerja maupun regulasi.

Tabel 2. 3 Distribusi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Berdasarkan Pangkat/Golongan/Ruang

No	Pangkat/Golongan/Ruang	Jumlah (Orang)	Laki-Laki	Perempuan	%
1	Pembina Tingkat I (IV/b)	2	2	0	1,39
2	Pembina (IV/a)	8	6	2	5,55
3	Penata Tingkat I (III/d)	27	14	13	18,75
4	Penata (III/c)	6	1	5	4,17
5	Penata Muda Tingkat I (III/b)	6	3	3	4,17
6	Penata Muda (III/a)	35	18	17	24,30
7	Pengatur Tingkat I (II/d)	34	18	16	23,61
8	Pengatur Muda (II/a)	26	11	15	18,05
Jumlah		144	73	71	100%

Sumber: Sub Bagian Umum Tata Laksana dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai menjadi faktor yang menunjang kinerja perangkat daerah. Keberhasilan dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan bergantung pada kualitas sarana yang dimiliki. Dalam konteks ini, sarana fisik seperti gedung kantor, ruang pertemuan, dan fasilitas pendukung lainnya menjadi fundamental dalam menciptakan lingkungan kerja yang efisien.

Tabel 2. 4 Daftar Inventaris Barang dan Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		Satuan
			Baik	Rusak Berat	
1	Station Wagon	10	8	2	Unit
2	Scooter	3	3	0	Unit
3	Sepeda Motor	26	20	6	Unit
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	1	0	Unit
5	Alat Kantor Lainnya (Lain- lain)	5	5	0	Unit
6	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	1	0	Unit
7	Lemari kayu	2	2	0	Unit
8	Perkakas Kantor	0	0	0	Unit
9	Sofa	10	10	0	Unit
10	Lemari Es	7	7	0	Unit
11	AC Unit	43	30	13	Unit
12	Alat Dapur Lainnya	0	0	0	Unit
13	Tustel	2	2	0	Unit
14	Handy Cam	4	4	0	Unit
15	Alat Rumah Tangga Lain-lain	0	0	0	Unit
16	P.C Unit	144	116	28	Unit
17	Laptop	97	44	53	Unit
18	Note Book	37	12	25	Unit
19	Printer	203	137	66	Unit
20	Monitor	8	8	0	Unit
21	Peralatan Personal Komputer Lain- lain	6	6	0	Unit
22	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	43	43	0	Unit
23	Proyektor + Attachment	16	16	0	Unit
24	Unintemuptible Power Supply (UPS)	25	25	0	Unit
25	Handphone	0	0	0	Unit
26	Meja Kerja	45	45	0	Unit
27	Alat Angkut Apung Bermotor Khusus Lain-lain	0	0	0	Unit
28	Alat Panen/Pengolahan Lain- lain	1	1	0	Unit

No	Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		Satuan
			Baik	Rusak Berat	
29	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	2	2	0	Unit
30	Kipas Angin	4	4	0	Unit
31	CPU	4	1	3	Unit
32	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	12	12	0	Unit
33	Peralatan studio Visual Lain- lain	2	2	0	Unit
34	Telephone Mobile	0	0	0	Unit
35	PLTA Lain-lain	0	0	0	Unit
36	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Lain-lain	0	0	0	Unit
37	Kursi Putar	29	29	0	Unit
38	Meja Komputer	6	6	0	Unit
39	Camera Video	2	2	0	Unit
40	Peralatan Mini Komputer Lain-lain	3	3	0	Unit
41	Personal Komputer	9	9	0	Unit
42	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	4	4	0	Unit
43	Band Kas	1	1	0	Unit
44	Kursi Lipat	169	169	0	Unit
45	Wireless	3	3	0	Unit
46	Server	2	2	0	Unit
47	Modem	2	2	0	Unit
48	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	37	37	0	Unit
49	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2	2	0	Unit
50	Layar	5	5	0	Unit
51	Filling Besi/Metal	55	55	0	Unit
52	Router	8	8	0	Unit
53	Peralatan Jaringan Lain-lain	21	21	0	Unit
54	Pick Up	1	1	0	Unit
55	Scanner	9	9	0	Unit
56	Alat Penghancur Kertas	9	9	0	Unit
57	Loudspeaker	2	2	0	Unit
58	Dispenser	2	2	0	Unit
59	Camera + Attachment	3	3	0	Unit
60	Facsimile	2	2	0	Unit
61	Mesin Absensi	4	4	0	Unit
62	Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain	7	7	0	Unit
63	Tabung Pemadam Kebakaran (APAR)	0	0	0	Unit
64	Slide Projector	1	1	0	Unit
	JUMLAH BARANG	1161	965	196	Unit

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kutai Kartanegara, 2025

Berdasarkan data barang inventaris aset menunjukkan bahwa

terdapat 196 unit barang dalam kondisi rusak berat, sehingga memerlukan pemeliharaan terhadap unit yang rusak serta dilakukan penghapusan aset agar tidak menjadi beban dinas.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Evaluasi kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan berdasarkan capaian indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) selama periode Renstra 2021–2024. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendorong pemberdayaan masyarakat dan penguatan desa sebagai entitas pembangunan.

Penilaian kinerja pelayanan meliputi dimensi: (1) pencapaian target output dan outcome, (2) kebermanfaatan layanan terhadap masyarakat desa, dan (3) kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Secara umum, DPMD telah menunjukkan kinerja yang cukup baik pada beberapa indikator strategis, terutama dalam hal pengelolaan dana desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, dan penguatan kelembagaan masyarakat. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam peningkatan kualitas perencanaan partisipatif desa, integrasi program pemberdayaan, serta penguatan inovasi desa.

Tabel berikut ini menyajikan rekapitulasi kinerja pelayanan dan anggaran realisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode 2022–2024.

Tabel 2.5: Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Prosentase tingkat perkembangan lembaga kemasyarakatan	100	100	100	100	100	100	100	100			100,00	100,00	100,00		
2	Prosentase tingkat penyelenggaraan pemerintahan desa	100	100	100	100	100	100	100	100			100,00	100,00	100,00		
3	Prosentase status desa berkembang menjadi desa maju di Kukar	10	31,8	31,7	29,3	27,6	29,59	35,13	52,08			295,90	110,47	164,29		
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	77	80	82	75	85	66,74	67	78,65			86,68	83,75	95,91		
5	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100			100,00	100,00	100,00		
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	12	12	12	12	12	12	12			100,00	100,00	100,00		
7	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	1	1	1	1	1	1	5			100,00	100,00	500,00		
8	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20	20	20	20	20	20	18,2	22			100,00	91,00	110,00		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	17	20	23	23	17	17	17	17			100,00	85,00	73,91		
10	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	112			100,00	100,00	112,00		
11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17	20	23	23	17	17	20	23			100,00	100,00	100,00		
12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17	20	23	23	17	17	13	22			100,00	65,00	95,65		
13	Prosentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa	1,55	5,18	10,36	25,91	38,86	2	5	11			129,03	96,53	106,18		
14	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa	35	31	27	27	28	19	15	23			54,29	48,39	85,19		
15	Prosentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa	100	100	100	100	100	100	10	100			100,00	10,00	100,00		
16	Jumlah Kerjasama Desa yang difasilitasi	59	57	57	57	58	64	13	57			108,47	22,81	100,00		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
17	Prosentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik	50	70	80	90	95	50	67	95			100,00	95,71	118,75		
18	Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	10	10	10	10	10	10	5	30			100,00	50,00	300,00		
19	Jumlah Desa yang dibina dan diawasi	193	193	193	193	193	193	180	193			100,00	93,26	100,00		
20	Prosentase Posyandu Aktif	45,22	51,51	57,79	64,07	70,35	49	92	87			108,36	178,61	150,55		
21	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100	100	100	100	100	100	100	100			100,00	100,00	100,00		
22	Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	529	823	823	824	827	4.666	4.618	4.721			882,04	561,12	573,63		

Berdasarkan tabel pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, tren capaian indikator menunjukkan dinamika yang bervariasi antar tahun dan indikator. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) mengalami fluktuasi: pada 2022 capaian 88 melebihi target (rasio 114,29%), namun turun pada 2023 menjadi 66,74 (rasio 83,43%), dan pada 2024 tidak tercapai sama sekali. Sebaliknya, indikator persentase desa yang memiliki tata ruang menunjukkan tren positif dan konsisten, dari 2 desa (2022), meningkat menjadi 5 desa (2023), hingga 10 desa (2024), selalu mencapai target yang ditetapkan.

Indikator realisasi kesepakatan kerja sama desa menunjukkan kinerja stabil dengan capaian 100% pada periode 2022–2024, sesuai target. Tren serupa terlihat pada indikator pertumbuhan pendapatan BUMDesa yang meskipun skalanya kecil, tetap konsisten memenuhi target hingga tahun 2024. Sementara itu, persentase desa tertib administrasi pemerintahan dalam kategori baik mencatat peningkatan signifikan, dari capaian 50% (2022) naik ke 67% (2023), dan mencapai target penuh 95% pada 2024.

Indikator pelayanan sosial masyarakat juga mencatat perkembangan yang menggembirakan. Persentase posyandu aktif menunjukkan lonjakan pesat, dari 49% (2022) ke 92% (2023), lalu 87% (2024), dengan rasio capaian bahkan mencapai 176,92% pada 2023. Sedangkan persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif konsisten terjaga di angka 100% sepanjang 2022–2024.

Secara keseluruhan, tren pencapaian indikator Renstra DPMD menampilkan pola campuran: sebagian indikator menunjukkan stabilitas dan konsistensi pencapaian target, sebagian lagi menunjukkan peningkatan progresif, namun terdapat pula indikator yang fluktuatif bahkan menurun drastis. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan tata kelola internal dan peningkatan kualitas perencanaan kinerja agar capaian di seluruh indikator dapat lebih merata dan berkelanjutan.

Tabel 2.6: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggar an	Real isasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp 33.879.931.687	Rp 82.143249.681	Rp 173.096.573.391	Rp 138.346.000.799	Rp 66.871.585.511	Rp 43.447.033.876	Rp 134.882.076.589	Rp 300.518.530.303			128,2	164,2	173,6			38,26	63,71
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 16.029.175.006	Rp 21.764.310.173	Rp 30.480.231.067	Rp 27.186.052.875	Rp 18.753.414.441	Rp 28.222.344.262	Rp 77.524.560.884	Rp 164.101.188.370			176,1	356,2	538,4			5,66	17,99
Program Panataan Desa	Rp 429.900.000	Rp 1.312.052.000	Rp 59.691.837.000	Rp 74.408.240.478	Rp 2.550.000.000	Rp 265.576.400	Rp 964.644.577	Rp 59.295.587.641			61,8	73,5	99,3			900,90	1.244,78
Program Kerjasama Desa	Rp 350.000.000	Rp 1.608.948.000	Rp 808.510.650	Rp 261.394.800	Rp 435.000.000	Rp 256.234.000	Rp 1.318.971.977	Rp 740.960.084			73,2	82,0	91,6			68,07	76,87
Program Administrasi Pemerintah Desa	Rp 13.600.746.881	Rp 26.741.035.828	Rp 30.767.536.174	Rp 20.834.239.792	Rp 21.194.043.870	Rp 11.551.469.846	Rp 25.484.353.507	Rp 29.743.504.397			84,9	95,3	96,7			25,41	55,54
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 3.470.109.800	Rp 30.716.903.680	Rp 51.348.458.500	Rp 15.656.072.854	Rp 23.939.127.200	Rp 3.151.409.368	Rp 29.589.545.644	Rp 46.637.289.811			90,8	96,3	90,8			177,55	218,04

Berdasarkan tabel diatas mengenai anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, terlihat adanya variasi yang cukup menarik antara alokasi anggaran, realisasi, dan efektivitas penggunaannya. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan tren peningkatan alokasi anggaran dari Rp16,0 miliar pada 2022 menjadi Rp30,4 miliar pada 2024, dengan realisasi yang cenderung lebih rendah. Rasio efektivitasnya meningkat dari 81,10% pada 2022 menjadi 92,70% pada 2023, lalu stabil di kisaran 90,80% pada 2024. Meskipun pengelolaan anggaran semakin konsisten, rata-rata pertumbuhan realisasi (368,15) masih di bawah pertumbuhan anggaran (494,04).

Program Penataan Desa mengalami lonjakan alokasi anggaran yang sangat besar, khususnya pada 2024 yang mencapai Rp59,7 miliar, dengan realisasi Rp59,2 miliar atau 99,30% dari target. Namun, rata-rata pertumbuhan realisasi (0,36) masih jauh tertinggal dibandingkan pertumbuhan anggaran (22.690,36), mengindikasikan adanya ketidakseimbangan dalam tren alokasi dan pemanfaatan anggaran. Sementara itu, Program Kerjasama Desa menunjukkan perkembangan positif, dengan rasio realisasi terhadap anggaran meningkat dari 73,20% pada 2022 menjadi 91,60% pada 2024. Pertumbuhan anggaran (833,56) dan realisasi (803,93) relatif seimbang, sehingga dapat dikatakan ada kesinambungan antara alokasi dan capaian program.

Pada Program Administrasi Pemerintah Desa, rasio realisasi terhadap anggaran meningkat stabil dari 84,90% pada 2022 menjadi 96,70% pada 2024. Rata-rata pertumbuhan realisasi (478,10) mendekati pertumbuhan anggaran (598,76), menandakan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup baik. Sedangkan pada Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, baik alokasi maupun realisasi anggaran meningkat drastis. Dari Rp3,47 miliar pada 2022, anggaran naik menjadi Rp51,3 miliar pada 2024, dengan realisasi yang juga melonjak dari Rp3,1 miliar pada 2022 menjadi Rp46,6 miliar pada 2024. Rasio efektivitas relatif tinggi (90,8%–96,3%), dan rata-rata pertumbuhan realisasi (2.418,82) sejalan dengan pertumbuhan anggaran (2.915,25), menunjukkan bahwa program ini menjadi salah satu prioritas dengan

capaian yang kuat.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan desa yang inklusif, mandiri, berdaya saing, serta sejalan dengan arah pembangunan jangka menengah daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan kelompok sasaran layanan sebagai landasan strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 2025–2029. Penetapan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memperkuat peran masyarakat desa dalam pembangunan, mendorong tata kelola pemerintahan desa yang efektif, serta mendukung pengembangan potensi desa secara berkelanjutan.

Adapun kelompok sasaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai berikut:

- Pemerintah Desa dan Aparatur Desa, termasuk kepala desa dan perangkatnya, sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga desa lainnya sebagai mitra pemerintah desa dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan serta representasi aspirasi masyarakat.
- Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) seperti LPM, Karang Taruna, PKK, RT/RW, dan Posyandu, yang berperan dalam penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat secara langsung di tingkat desa.
- Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama, sebagai pelaku ekonomi desa yang strategis dalam pengelolaan potensi desa dan peningkatan pendapatan asli desa.
- Masyarakat desa secara umum, khususnya kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan keluarga miskin, yang menjadi sasaran utama dalam program pemberdayaan dan penguatan kapasitas sosial-ekonomi.
- Kelompok Usaha Masyarakat Desa, termasuk usaha mikro dan

kelompok tani, nelayan, serta pelaku ekonomi kreatif di desa, yang membutuhkan dukungan dalam pengembangan usaha dan akses pembiayaan.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak bekerja secara terpisah, melainkan dalam kerangka kolaboratif lintas sektor dan aktor. Berikut beberapa perangkat daerah dan mitra kerja yang berkaitan erat dengan pelaksanaan program DPMD:

- 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam rangka validasi data kependudukan desa sebagai dasar perencanaan dan pembangunan.
- 2) Dinas Sosial, dalam penguatan basis data masyarakat miskin, pemberdayaan kelompok rentan, serta program perlindungan sosial berbasis desa.
- 3) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam pengarusutamaan gender dan perlindungan kelompok rentan di tingkat desa.
- 4) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, dalam penguatan sistem informasi desa serta literasi digital aparatur dan masyarakat desa.
- 5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), sebagai mitra utama dalam sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan desa, serta fasilitasi pengembangan kawasan perdesaan.
- 6) Dinas Kesehatan, dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat desa, penguatan posyandu, penanggulangan stunting, serta peningkatan derajat kesehatan.
- 7) Inspektorat Daerah, dalam pengawasan dan pembinaan tata kelola keuangan desa agar akuntabel dan transparan.

Selain itu, terdapat sejumlah mitra eksternal strategis yang mendukung Dinas PMD dalam pemberian layanan:

- 1) Kementerian Dalam Negeri, sebagai mitra vertikal dalam penyelenggaraan tata pemerintahan desa.
- 2) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) serta Direktorat Jenderal Bina

Pemerintahan Desa Kemendagri, sebagai mitra vertikal dalam penyelenggaraan program nasional berbasis desa dan pemberdayaan masyarakat.

- 3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, sebagai mitra vertikal dalam penyelenggaraan urusan PMD.
- 4) Perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan lembaga pelatihan, sebagai mitra dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia desa dan pendampingan pemberdayaan masyarakat.
- 5) Forum CSR, dunia usaha, dan perbankan, sebagai mitra dalam pembiayaan alternatif, pengembangan ekonomi lokal, dan kolaborasi program tanggung jawab sosial di wilayah desa.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dihadapkan berbagai macam permasalahan dan isu strategis baik di tingkat pemerintah daerah maupun di perangkat daerah. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diuraikan sebagai berikut:

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta telaah RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, terdapat masalah pokok **“Belum Optimalnya Pembangunan Desa”**, dengan empat permasalahan yang menjadi fokus Dinas PMD, yaitu:

1. Belum optimalnya penataan desa.

Permasalahan ini ditandai dengan masih adanya keterlambatan penetapan kode desa, permasalahan batas wilayah, serta belum tuntasnya identifikasi kewenangan desa. Walaupun nilai IDM meningkat dari 0,6840 (2020) menjadi 0,7969 (2024), masih terdapat 23 desa (11,91%) berstatus berkembang, yang menunjukkan bahwa penataan kelembagaan dan kewilayahan desa belum sepenuhnya efektif.

2. Belum optimalnya fasilitasi kerjasama antar desa.

Potensi ekonomi lokal antar desa belum terintegrasi secara maksimal. Kerjasama desa dengan pihak ketiga masih terbatas, padahal RPJMD mengalokasikan Rp100 miliar per tahun untuk pembangunan kawasan perdesaan. Minimnya fasilitasi kerjasama membuat kawasan desa sulit berkembang sebagai pusat pertumbuhan baru, terutama dalam menghadapi peran Kukar sebagai penyangga IKN.

3. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib administrasi dan akuntabel.

Keterbatasan data desa serta lemahnya sistem administrasi masih menjadi persoalan mendasar. Beberapa indikator pembangunan desa, termasuk SDGs Desa, belum memiliki data akurat. Akibatnya, monitoring dan evaluasi pembangunan desa belum berjalan baik, dan tata kelola pemerintahan desa masih belum sepenuhnya transparan, akuntabel, serta berbasis digital sebagaimana amanat RPJMD.

4. Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan desa.

Meskipun Kutai Kartanegara memiliki kekayaan sosial- budaya dengan berbagai komunitas adat, misalnya 1.506 jiwa Kutai Adat Lawas Sumping Layang di Tabang, kontribusi lembaga kemasyarakatan dan adat dalam pembangunan desa masih terbatas. RPJMD menyoroti adanya erosi nilai adat dan lemahnya regenerasi budaya, yang berpotensi mengurangi ketahanan sosial desa di tengah arus modernisasi dan pembangunan IKN.

Rumusan permasalahan DPMD diuraikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.7 Perumusan Permasalahan DPMD

PERMASALAHAN POKOK	MASALAH		AKAR MASALAH	
Belum Optimalnya Pembangunan Desa	1	Belum Optimalnya penataan Desa	1	Belum tersedianya data tata wilayah desa
			2	Belum adanya regulasi mekanisme Penyusunan Tata Ruang Desa
			3	Belum optimalnya pembinaan terhadap Pemerintahan Desa dalam penyusunan Perdes kewenangan lokal desa
			4	Belum tersedianya data sarana prasarana valid yang dimiliki Desa
	2	Belum Optimalnya Fasilitasi Kerjasama	1	Belum optimalnya sosialisasi dan Bimtek terhadap Badan

PERMASALAHAN POKOK	MASALAH		AKAR MASALAH	
		Antar Desa		Kerjasama Antar Desa (BKAD)
			2	Belum optimalnya data kerjasama desa dengan pihak ketiga.
			3	Belum terpetakannya Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan
			4	Belum optimalnya pembinaan dan pendampingan terhadap desa dalam pembangunan kawasan perdesaan
	3	Belum optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tertib administrasi dan Akuntabel	1	Masih rendahnya kapasitas aparatatur pemerintahan desa dan BPD
			2	Masih terdapat desa yang menyusun Perencanaan Pembangunan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa belum sesuai dengan pedoman/peraturan yang berlaku
			3	Belum dievaluasinya produk Hukum Desa
			4	Belum tertibnya Kepala Desa menyampaikan Laporan kinerja kepada Bupati melalui DPMD
			5	Belum terevaluasinya Profil Desa, Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan secara berkelanjutan
			6	Belum optimalnya Pembinaan dan Pendampingan terhadap BUMDesa
			7	Belum optimalnya fasilitasi manajemen pemerintahan desa dengan baik
			8	Masih terdapat beberapa desa yang belum ada kesepakatan tapal batas
	4	Belum optimalnya peran Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Hukum Adat dalam pembangunan Desa	1	Masih banyak Masyarakat Adat yang belum teridentifikasi
			2	Belum maksimalnya pendataan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat Desa/Kelurahan
			3	Belum tersedianya data LKD dan LAD yang valid
			4	Rendahnya kapasitas SDM kader LKD dan LAD
			5	Masih rendahnya kinerja Kelembagaan LKD, LAD
			6	Belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan ekonomi di desa.
			7	Kurangnya kesadaran gotong royong dan ketahanan masyarakat
			8	Masih rendahnya keterampilan dan pengetahuan kelompok usaha masyarakat dan rumah tangga miskin di pedesaan
			9	Minimnya fasilitasi kegiatan TTG

2.2.2. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Rumusan isu strategis dihasilkan dengan menelaah potensi, permasalahan, isu KLHS yang relevan, lingkungan dinamis pada tingkat global, nasional, regional, dan kabupaten. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa isu strategis utama yang akan menjadi prioritas Dinas PMD:

1. Peningkatan status desa mandiri.

Masih adanya 23 desa berkembang pada tahun 2024 menunjukkan bahwa peningkatan status desa menjadi maju dan mandiri masih menjadi isu strategis penting. Percepatan desa mandiri merupakan indikator utama pencapaian kemandirian desa.

2. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik desa.

Isu ini terkait erat dengan keterbatasan data dan lemahnya sistem administrasi desa. Dinas PMD dituntut untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa berbasis digital dan akuntabel agar kualitas pelayanan publik meningkat dan sejalan dengan prinsip Satu Data Daerah.

3. Pendampingan dan pengembangan BUMDesa

Kontribusi BUMDes masih rendah dengan indeks dukungan baru 64,47 poin (kategori sedang). Isu strategis ini menekankan pentingnya memperkuat kapasitas BUMDes, mendorong diversifikasi usaha, serta memperluas kemitraan dengan sektor swasta agar BUMDes benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi desa. Pengembangan model kemitraan bisnis BUMDes diarahkan untuk memberikan peluang kerja atau pendapatan tambahan bagi masyarakat desa termasuk keluarga miskin dan kelompok dengan akses terbatas.

4. Peran lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pembangunan dan perekonomian desa dan kelurahan yang berkelanjutan

Mengingat RPJMD menegaskan pentingnya ketahanan sosial

dan pelestarian budaya, maka lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat harus diberdayakan secara lebih sistematis agar berkontribusi dalam pembangunan desa, menjaga kohesi sosial, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis kearifan lokal. Dalam konteks pembangunan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan berperan mengintegrasikan nilai-nilai inklusif, memastikan seluruh kelompok termasuk perempuan, pemuda, lansia, penyandang disabilitas, serta masyarakat miskin memiliki ruang yang sama untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan mendapatkan manfaat pembangunan.

Dengan demikian, perumusan permasalahan dan isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 2025–2029 merupakan refleksi dari kondisi objektif desa yang masih menghadapi tantangan penataan kelembagaan, keterbatasan kerjasama antar desa, kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel, serta belum optimalnya peran kelembagaan sosial dan adat dalam pembangunan desa. Keenam isu strategis yang ditetapkan selanjutnya menjadi landasan penting dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan Renstra, sehingga seluruh program dan kegiatan Dinas PMD tidak hanya mampu menjawab persoalan internal desa, tetapi juga berkontribusi nyata dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025– 2029.

Tabel 2.8 Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	KUKAR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Desa-desas strategis penyangga IKN 2. Desa dengan potensi industri hijau, agroindustri, dan ekonomi non-ekstraktif	Belum Optimalnya penataan Desa	Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat dan UMKM	SDGs 1 No Poverty, SDGs 10 Reduced Inequalities	Target penurunan desa tertinggal dan pengentasan kemiskinan ekstrem	Pembangunan kawasan perdesaan terpadu, integrasi dengan IKN	Pengembangan ekonomi berkelanjutan berbasis sektor ekonomi non ekstraktif	Peningkatan status Desa Mandiri
1. Kawasan perdesaan dengan potensi pusat pertumbuhan baru 2. Potensi integrasi ekonomi antar desa dalam mendukung suplai IKN 3. Potensi Kerjasama Pihak ketiga dengan Pemerintah Desa	Belum Optimalnya Fasilitasi Kerjasama Antar Desa		SDGs 8 Decent Work and Economic Growth	Penguatan ekonomi desa melalui BUMDesa, UMKM, desa wisata	Peningkatan Desa Mandiri terutama desa penyangga IKN	Akselerasi Pembangunan Kutai Kartanegara Sebagai Penyangga IKN	
1. Kesiapan desa untuk transformasi digital 2. Infrastruktur administrasi desa yang terus berkembang 3. Dukungan fiskal daerah untuk peningkatan pelayanan desa 4. Kelembagaan BUMDesa pada desa potensial agribisnis & pariwisata 5. Pelayanan Publik Desa ke Masyarakat 6. Peningkatan pendapatan Desa	Belum optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tertib administrasi dan Akuntabel					Akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem dan kemiskinan kultural	
			SDGs 16 Peace, Justice and Strong Institutions	Transformasi digital pemerintahan, Satu Data Indonesia dan SPBE	Penguatan data desa melalui EPDeskel dan Satu Data Daerah		Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan kualitas Pelayanan Publik Desa
							Pendampingan dan pengembangan BUMDesa
1. Budaya lokal (Kutai, Dayak, dan komunitas adat lainnya) yang masih lestari 2. Potensi wisata budaya dan ekonomi berbasis kearifan lokal 3. Modal sosial tinggi dalam komunitas adat 4. Ketahanan sosial desa kuat namun perlu penguatan di	Belum optimalnya peran Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Hukum Adat dalam pembangunan Desa		SDGs 7 Affordable and Clean Energy	Pemerataan akses listrik desa, pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Program Kaltim Energi Hijau untuk desa		Peran Lembaga Kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pembangunan dan perekonomian desa dan kelurahan yang berkelanjutan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	KUKAR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
wilayah terpencil (Tabang, Kenohan, Kembang Janggut) 5. Komunitas adat Kutai Adat Lawas Sumping Layang (1.506 jiwa) 6. Lembaga adat Kutai & Dayak yang kuat 7. Basis partisipasi masyarakat yang tinggi melalui LKD & Karang Taruna							

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029

Visi Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 yaitu : KUKAR IDAMAN TERBAIK “ Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang maju, Sejahtera dan Berkelanjutan “, dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029 serta berdasarkan tugas dan Fungsi DPMD menunjang ada 4 (empat) Misi yaitu : Misi 1 : Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial, Misi 2 : Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif, Misi 4 : Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan local dan Misi 5 yaitu : Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.

Penyusunan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 2025–2029 mengacu pada peraturan perundang-undangan serta dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berlaku, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjadi dasar hukum penting dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Tujuan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, yang telah ditetapkan adalah T3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan Sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Menurunnya ketimpangan.

Berdasarkan peraturan diatas, dirumuskan Tujuan Renstra DPMD

Tahun 2025-2029 adalah: **Meningkatnya Kemandirian Desa**. Indikator Tujuan: Persentase Desa Mandiri. Tujuan ini mencerminkan arah jangka menengah Dinas PMD dalam membina pemerintahan desa, mendorong peran serta masyarakat, serta mempercepat pencapaian desa mandiri melalui pembangunan berbasis potensi lokal dan kelembagaan desa yang kuat.

3.2. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

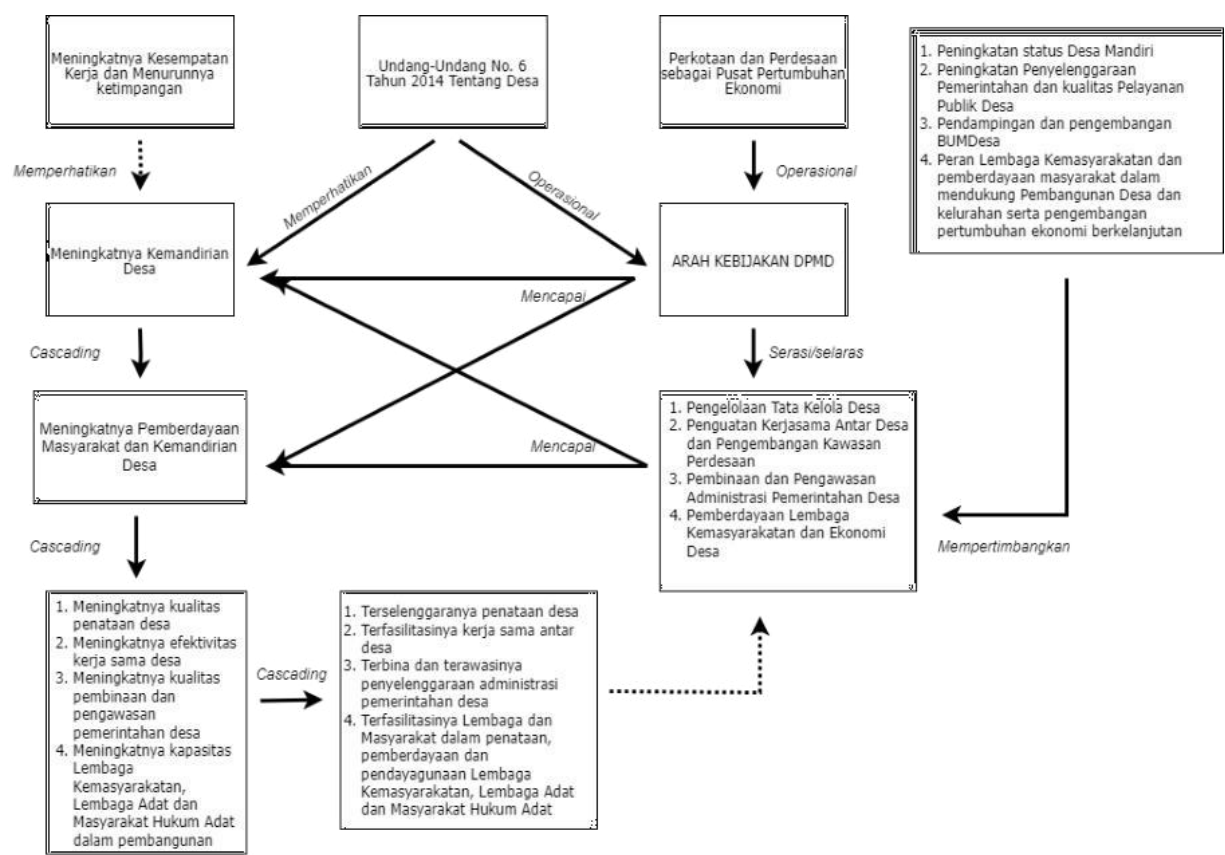
Selanjutnya, tujuan diturunkan menjadi sasaran. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD. Sasaran Renstra DPMD tahun 2025-2029 adalah: **Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa**, dengan indikator: Persentase Desa Berkembang dan Maju Menuju Mandiri.

Sasaran Renstra Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa juga mendukung pencapaian program prioritas Bupati “Program 100 Milyar bagi Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik”. Program ini merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk memberikan ruang kepada pemerintahan desa, untuk memperkuat kolaborasi pembangunan berbasis potensi desa, dengan mendorong kerjasama antar Pemerintah Desa dalam kerangka pembangunan wilayah perdesaan yang di desain secara fokus dan tematik.

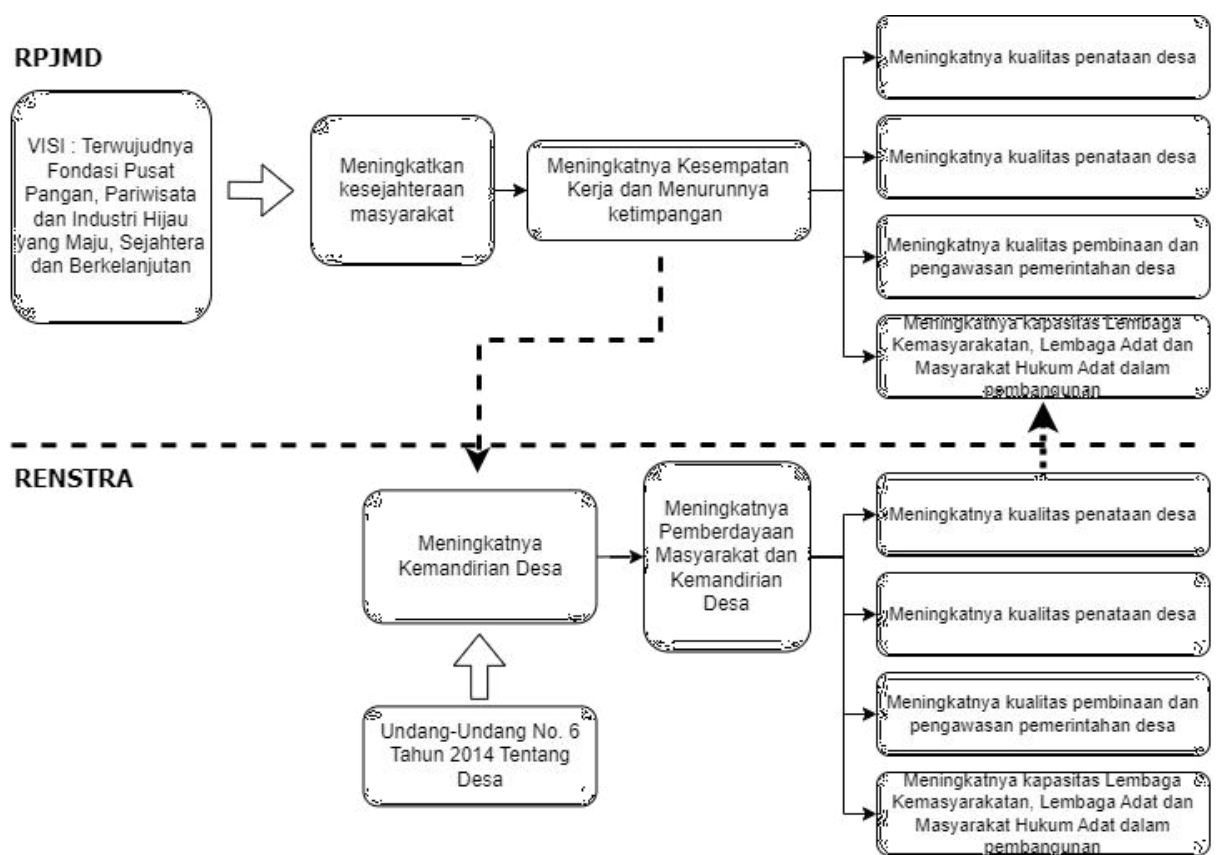
Sasaran Renstra juga diarahkan untuk lebih terukur dan terfokus dengan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*) sehingga pencapaiannya dapat dievaluasi secara tahunan dan memberi kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran RPJMD. Dengan demikian, selain indikator peningkatan status desa mandiri dan berkembang, indikator lain yang mencerminkan kualitas pembangunan kawasan pedesaan secara menyeluruh juga menjadi bagian dari pengukuran kinerja Dinas PMD.

Penekanan pada indikator dan sasaran yang lebih operasional ini diharapkan dapat mempercepat kemandirian desa, meningkatkan produktivitas ekonomi berbasis potensi lokal, memperkuat kelembagaan

desa, serta menjamin pembangunan kawasan pedesaan yang berkeadilan dan berkelanjutan.



Gambar 3. 1 Konsep Renstra DPM



Gambar 3. 2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra DPMD

Adapun rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 3.1:

Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra DPMD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
NSPK: Permendes No. 9 Tahun 2024 Tentang Indeks Desa Sasaran RPJMD: - Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Menurunnya ketimpangan - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kemandirian Desa		Persentase Desa Mandiri (%)	45,08	47,67	52,33	56,48	61,14	66,32	72,02	
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Persentase Desa Berkembang dan Maju Menuju Mandiri (%)	9,40	6,60	8,08	8,79	10,98	13,70	18,64	

Sumber: hasil analisis, 2025

3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2025–2029 merupakan instrumen penting dalam mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan.

Penyusunan strategi ini memperhatikan isu strategis daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029, yang menekankan transformasi ekonomi berbasis industrialisasi yang inklusif, penguatan ketahanan pangan, pemerataan pembangunan wilayah, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan terdigitalisasi, peningkatan daya saing SDM, penguatan ketahanan sosial dan budaya, serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Dengan pendekatan tersebut, strategi DPMD tidak hanya difokuskan pada pembangunan desa semata, tetapi juga diarahkan untuk menjadi bagian integral dari transformasi pembangunan daerah, terutama dalam konteks posisi Kutai Kartanegara sebagai mitra strategis IKN.

Adapun strategi dalam mencapai sasaran renstra DPMD, meliputi:

1) Pengelolaan Tata Kelola Desa

Strategi ini diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berbasis digital. Penataan tata kelola desa tidak hanya sebatas peningkatan kapasitas aparatur, melainkan juga penguatan kelembagaan ekonomi dan sosial desa agar mampu memberikan pelayanan publik yang efektif sekaligus mendorong daya saing desa. Lebih lanjut, tata kelola desa juga diarahkan pada peningkatan kualitas penyediaan pelayanan publik dan sarana prasarana desa yang ramah perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

Tahap 2026: Fokus pada peningkatan kapasitas aparatur

desa, BPD, BUMDes, LKD, LAD, dan masyarakat hukum adat. Termasuk penguatan kader Posyandu serta penyediaan sarana prasarana kelembagaan desa. Hal ini sejalan dengan prioritas RPJMD dalam peningkatan kualitas SDM dan fondasi kelembagaan desa.

Tahap 2027: Dilanjutkan dengan pemberian jaminan sosial berupa BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan bagi perangkat desa dan kader, sebagai insentif untuk memperkuat keberlanjutan tata kelola desa.

Tahap 2028: Pendampingan kelembagaan desa, khususnya BUMDes dan desa wisata, dengan sistem administrasi yang transparan.

Tahap 2029: Monitoring dan evaluasi administrasi desa berbasis kelembagaan kawasan melalui peran BKAD.

Tahap 2030: Penyusunan model tata kelola desa yang terintegrasi dengan rencana pembangunan desa dan mendukung digitalisasi pelayanan publik.

Dengan tahapan ini, tata kelola desa diarahkan untuk memperkuat good governance di tingkat desa, mendukung agenda e-government daerah, dan menyiapkan desa menjadi mitra strategis dalam pemerintahan berbasis digital.

2) Penguatan Kerjasama Antar Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan

Strategi ini mendukung misi RPJMD dalam transformasi ekonomi inklusif dan pemerataan pembangunan wilayah. Kolaborasi antar desa dan dengan pihak ketiga diharapkan menciptakan skala ekonomi baru di kawasan perdesaan, sehingga desa tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan membentuk ekosistem pembangunan bersama. Penguatan kemitraan antar desa, BUMDes, dan lembaga lokal juga diarahkan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan serta manfaat kerjasama.

Tahap 2026: Dimulai dengan fasilitasi awal kerjasama antar desa dan penguatan kelembagaan BUMDes sebagai fondasi ekonomi kolektif.

Tahap 2027: Insentif kesejahteraan aparatur desa dan kelembagaan lokal melalui program BPJS, sebagai upaya memperkuat partisipasi dan keberlanjutan kerjasama antar desa.

Tahap 2028: Pengembangan unit usaha BUMDesa sebagai basis ekonomi kolektif antar desa dan penguatan rantai nilai antar kawasan.

Tahap 2029: Dilanjutkan dengan pendampingan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi perkembangan kawasan perdesaan, agar pengelolaan kawasan semakin efektif dan berkelanjutan.

Tahap 2030: Optimalisasi peran BKAD, aparatur desa, dan masyarakat hukum adat dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan kawasan terpadu berbasis kewilayahan.

Strategi ini memastikan bahwa desa tidak hanya menjadi entitas administratif, tetapi juga aktor pembangunan wilayah yang mampu berkontribusi pada transformasi ekonomi daerah dan mendukung peran Kukar sebagai penyangga IKN.

3) Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa

Pembinaan dan pengawasan administrasi desa menjadi pilar penting untuk memastikan desa mampu menyelenggarakan pemerintahan secara tertib, transparan, dan sesuai regulasi.

Strategi ini sejalan dengan agenda RPJMD untuk optimalisasi tata kelola dan birokrasi terdigitalisasi. Dalam pelaksanaan strategi ini, prinsip pengarusutamaan gender, disabilitas dan inklusi sosial menjadi bagian dari pembinaan perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes), penyusunan APBDes yang responsif gender, serta pengelolaan keuangan dan aset desa yang transparan dan adil bagi seluruh warga desa.

Tahap 2026: Peningkatan kapasitas pengurus desa dan kelembagaan dalam tertib administrasi.

Tahap 2027: Pemberian BPJS dan insentif sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan untuk memperkuat disiplin administrasi.

Tahap 2028: Pendampingan administrasi berbasis transparansi, terutama pada BUMDes dan desa wisata.

Tahap 2029: Monitoring dan evaluasi administrasi desa terintegrasi dengan kelembagaan kawasan.

Tahap 2030: Penyusunan model tata kelola administrasi desa yang terintegrasi dengan rencana pembangunan desa serta sistem digitalisasi daerah.

Melalui strategi ini, desa diarahkan menjadi unit pemerintahan yang lebih modern dan akuntabel, dengan administrasi yang mendukung keterbukaan informasi dan pelayanan publik digital.

4) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Ekonomi Desa

Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD, LAD, kelompok usaha) menjadi strategi utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan ekstrem, serta memperkuat ketahanan sosial dan budaya lokal. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan ekonomi produktif berbasis kelompok perempuan dan rentan, serta pendampingan UMKM desa untuk membuka peluang ekonomi yang merata. Strategi ini selaras dengan isu RPJMD terkait pengentasan kemiskinan, ketahanan sosial, dan pelestarian budaya.

Tahap 2026: Penyediaan sarana dan prasarana desa serta dukungan layanan dasar untuk lembaga kemasyarakatan desa.

Tahap 2027: Pemberian BPJS dan insentif operasional bagi kader dan kelompok masyarakat desa.

Tahap 2028: Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi masyarakat, pendampingan BUMDes olahan, dan penguatan desa wisata.

Tahap 2029: Pemberdayaan LKD dan LAD dalam program ekonomi produktif serta pembangunan sosial desa.

Tahap 2030: Peningkatan kapasitas aparatur desa, BPD, BUMDes, dan lembaga kemasyarakatan dalam mendukung ekonomi produktif, melestarikan budaya lokal, serta menjaga identitas desa.

Dengan strategi ini, desa didorong menjadi pusat pemberdayaan masyarakat yang mampu memperkuat ketahanan sosial-ekonomi, mengurangi ketimpangan, serta melestarikan nilai - nilai budaya lokal di tengah arus modernisasi.

Secara keseluruhan dapat dipetakan bahwa, strategi Dinas PMD Kabupaten Kutai Kartanegara bertujuan untuk:

- 1) Mendukung transformasi ekonomi inklusif melalui penguatan kelembagaan desa, BUMDes, dan kerjasama antar desa.
- 2) Memperkuat pemerataan pembangunan wilayah melalui pengembangan kawasan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan baru.
- 3) Mendorong tata kelola pemerintahan digital melalui pembinaan administrasi desa yang transparan dan modern.
- 4) Mengakselerasi daya saing SDM desa melalui peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan lokal.
- 5) Memperkokoh ketahanan sosial dan budaya serta mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa.

Dengan demikian, strategi Renstra DPMD tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga transformasional, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian

tujuan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025–2029.

Dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Periode 2025-2029 selama periode RPJMD yang pencapaiannya perlu dilakukan rumusan pentahapan prioritas pembangunan yang merupakan bagian dari strategi. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra

Bidang	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	Pemenuhan fondasi infrastruktur dan penataan kelembagaan desa	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemajuan Desa	Pemerataan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Penguatan Kemandirian Desa dalam mewujudkan KUKAR IDAMAN TERBAIK	Pemantapan Kemandirian Desa dalam KUKAR IDAMAN TERBAIK
Bidang Penataan Desa	Fasilitasi Sarana Prasana Desa	Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa	Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa	Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa	Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Fasilitasi Tata Wilayah Desa
Bidang Kerjasama Desa	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dan Pihak Ketiga	Peningkatan Kerjasam Antar Desa dan Pihak Ketiga	Pengembangan Kawasan Perdesaan	Pendampingan, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Kawasan Perdesaan	Pendampingan, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Kawasan Perdesaan
	Pengembangan Kawasan Perdesaan	Mendorong perluasan Kerjasama antar Pemerintah Desa dalam kerangka pembangunan wilayah perdesaan yang di desain secara fokus dan tematik	Memperkuat kolaborasi dan Ekosistem Kewirausahaan yang Inovatif Melalui Hilirisasi Produk Lokal Desa yang strategis	Peningkatan Kapasitas BKAD dalam Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Penguatan rantai nilai dan akselerasi hilirisasi komoditas unggulan Desa guna Meningkatkan Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat di Desa

Bidang	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	Pemenuhan fondasi infrastruktur dan penataan kelembagaan desa	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemajuan Desa	Pemerataan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Penguatan Kemandirian Desa dalam mewujudkan KUKAR IDAMAN TERBAIK	Pemantapan Kemandirian Desa dalam KUKAR IDAMAN TERBAIK
Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan BUMDesa dan Kerjasama Desa	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, BPD, dan BUMDesa	Pendampingan Pengembangan Unit Usaha Produk Olahan BUMDesa	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, BPD, BUMDesa dalam berpartisipasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa yang berkualitas	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan BUMDesa dan Kerjasama Desa
	Pemberian BPJS Ketenagakerjaan Kades dan Perangkat dan BPD	Pemberian BPJS Ketenagakerjaan Kades dan Perangkat dan BPD	Pemberian BPJS Ketenagakerjaan Kades dan Perangkat dan BPD	Pemberian BPJS Ketenagakerjaan Kades dan Perangkat dan BPD	Pemberian BPJS Ketenagakerjaan Kades dan Perangkat dan BPD
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa	Penyediaan Sarana dan Prasarana Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Pemberian Insentif dan Operasional bagi Pengurus dan Kader Posyandu	Pendampingan dan Pengembangan Wisata Desa	Pemberdayaan dan Pendayagunaan LKD/K, LAD/K dalam melaksanakan Program Ekonomi Produktif	Peningkatan , LKD/K, LAD/K dan Masyarakat Hukum Adat dalam berpartisipasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa yang berkualitas
	Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat	Peningkatan Sarana dan Prasana Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat	Pembinaan Posyantekdes dan Peningkatan pemanfaatan TTG dalam rangka meningkatkan ekonomi unggulan desa	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan BUMDesa dan Kerjasama Desa
	Peningkatan Kapasitas Pengurus dan Kader Posyandu	Penguatan Struktur Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Pendampingan dan Pengembangan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat	Gelar TTG Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten	Penguatan Jejaring Kemitraan Ekonomi Desa Berkelanjutan melalui kolaborasi strategis antara Pemerintah Desa, BUMDesa, LKD/K, UMKM Desa, dan Pelaku Industri Hijau
	Pemberian BPJS Ketenagakerjaan RT dan operasional Kader Posyandu	Peningkatan Kapasitas LKD/K, LAD/K dan Masyarakat Hukum Adat	Pendampingan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Adat dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Desa	Peningkatan Kompetensi Teknis Kader LKD/K, LAD/K dan Masyarakat Hukum Adat dalam bidang perlindungan sosial, kewirausahaan desa, dan penguatan	Penguatan Tata Kelola Lembaga Kemasyarakatan dan Adat menuju model kelembagaan desa inklusif dan berkelanjutan pasca-transisi 2030

	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Bidang	Pemenuhan fondasi infrastruktur dan penataan kelembagaan desa	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemajuan Desa	Pemerataan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Penguatan Kemandirian Desa dalam mewujudkan KUKAR IDAMAN TERBAIK	Pemantapan Kemandirian Desa dalam KUKAR IDAMAN TERBAIK
				ketahanan sosial budaya	

Penahapan pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026–2030 disusun selaras dengan penahapan pembangunan daerah dalam RPJMD. Dengan demikian, setiap tahapan pembangunan desa dan kawasan perdesaan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Pada Tahap I (2026), fokus pembangunan daerah adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan industri berbasis komoditas unggulan yang didukung oleh pembangunan infrastruktur dasar. Sejalan dengan itu, Renstra DPMD diarahkan pada penguatan kapasitas aparatur desa, BPD, BUMDes, LKD/K, LAD/K, serta masyarakat hukum adat. Upaya ini diperkokoh melalui peningkatan kapasitas pengurus dan kader Posyandu, penyediaan sarana dan prasarana desa, serta pemberian jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa. Penekanan pada penguatan SDM desa di tahap ini sesuai dengan prioritas peningkatan kualitas SDM dalam RPJMD.

Pada Tahap II (2027), RPJMD menekankan penguatan infrastruktur, konektivitas antarwilayah, serta pengembangan sektor inklusif. DPMD menyesuaikan arah kebijakannya melalui peningkatan kapasitas kelembagaan BUMDes dan kerjasama desa, pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi perangkat desa, serta pendampingan pengembangan wisata desa. Program-program ini diharapkan memperkuat konektivitas wilayah pedesaan dan meningkatkan inklusivitas pembangunan melalui pemberdayaan ekonomi lokal.

Pada Tahap III (2028), RPJMD mengarahkan pembangunan pada optimalisasi kawasan ekonomi strategis dan perluasan industri berbasis komoditas unggulan. DPMD mendukung tahapan ini dengan peningkatan kapasitas pengurus BUMDes, pendampingan kelompok usaha ekonomi masyarakat, serta pengembangan unit usaha produk olahan BUMDes. Dengan demikian, desa didorong untuk menjadi bagian dari kawasan ekonomi strategis melalui penguatan kelembagaan ekonomi dan diversifikasi produk unggulan berbasis lokal. Diharapkan, pembangunan desa tidak hanya meningkatkan kapasitas institusional dan ekonomi, tetapi juga menjamin pemerataan manfaat bagi semua kelompok masyarakat termasuk perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, pemuda, dan masyarakat adat.

Selanjutnya, **pada Tahap IV (2029),** RPJMD menargetkan tercapainya infrastruktur optimal, SDM unggul, dan ekonomi inklusif berbasis industrialisasi. Renstra DPMD mendukung arah ini dengan meningkatkan kapasitas BKAD dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, melaksanakan pendampingan dan monitoring kawasan perdesaan, serta memberdayakan lembaga kemasyarakatan desa (LKD/K, LAD/K) dalam program ekonomi produktif. Tahap ini memperlihatkan keterpaduan antara industrialisasi inklusif di tingkat daerah dengan transformasi kelembagaan dan ekonomi desa di tingkat lokal.

Pada Tahap V (2030), RPJMD menekankan kesinambungan pembangunan dalam masa transisi pemerintahan, dengan penekanan pada daya saing industri, tata kelola berbasis teknologi, dan pembangunan berkelanjutan. DPMD menyesuaikan dengan melanjutkan penguatan kapasitas BKAD dalam perencanaan kawasan perdesaan, monitoring dan evaluasi kawasan desa, serta peningkatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat hukum adat dalam perencanaan pembangunan desa yang berkualitas. Penahapan ini memastikan kesinambungan pembangunan desa sekaligus menyiapkan fondasi yang kokoh untuk estafet pembangunan pada periode RPJPD berikutnya.

Dengan penahapan tersebut, Renstra DPMD tidak hanya menjaga konsistensi substansi program teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, tetapi juga menjamin keselarasan dengan RPJMD, sehingga pembangunan desa dan kawasan perdesaan dapat berkontribusi signifikan terhadap terwujudnya transformasi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk pembangunan sampai dengan 2030 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 3 Perumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Tema I: Penguatan Penataan dan Kelembagaan Desa			
I.1	Bidang Penataan Desa			
1.1.1	Permendagri No. 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa	1. Penyelesaian pembangunan kebutuhan infrastruktur dasar di seluruh wilayah Kutai Kartanegara 2. Penguatan potensi usaha pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata 3. Penguatan agroindustri dan pariwisata lokal berbasis kearifan budaya 4. Penyiapan pilot klaster ekonomi hijau dan ekonomi kreatif 5. Pemasaran produk unggulan desa berbasis digital 6. Penguatan integrasi ekonomi antarwilayah dan mitra IKN	Pendampingan Desa Persiapan dan Penamaan Kode Desa	
1.1.2	Permendagri No. 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, Permendagri No. 111 Tahun 2016 Tentang Peraturan Desa		Penataan Wilayah Desa	
1.1.3	Permendagri No. 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman, Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Fasilitasi Penegasan Batas Desa	
1.1.4	Permendagri No. 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa		Pengadaan Sarana dan Prasarana Desa	
1.1.5	Permendes No. 9 Tahun 2024 Tentang Indeks Desa		Analisis Data IDM/ID	
1.1.6	Permendagri No. 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan		Pendataan Tingkat Perkembangan Desa melalui Aplikasi EPDesKel dan Pelaksanaan Lomba Tingkat Kecamatan dan Kabupaten	

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.2	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa			
1.2.1	Permendagri No. 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, Perbup No.44 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Asal Usul dan Skala Lokal Desa		Penetapan dan pendampingan identifikasi potensi kewenangan Desa	
1.2.2	Permendagri No. 111 Tahun 2016 Tentang Peraturan Desa, Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa, Perbup No. 43 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa, Perbup No. 5 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Desa		Penyusunan Draft Perbub ADD, BHPRD, APBDesa, SILTAP, Barang dan Jasa, Keuangan Desa, SOTK, Pilkades dan Desa Persiapan	
1.2.3	Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa, Permendes No. 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perbup No.13 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Desa		Pembinaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
1.2.4	Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa, Perbup No. 43 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa, Perbup No. 5 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Desa		Pembekalan Tim Kecamatan Evaluasi APBDesa	
1.2.5	Permendagri No. 111 Tahun 2016 Tentang Peraturan Desa, Perbup No. 46 Tahun 2022 Tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa		Pelaksanaan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	
1.2.6	Permendagri No. 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, Perbup No. 44 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Asal Usul dan Skala Lokal Desa, Permendagri		Penyusunan Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	No. 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan			
2	Tema 2: Penguatan Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan			
2.1	Bidang Kerjasama Desa			
2.1.1	Permendagri No. 96 Tahun 2027 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa	1. Penetapan kawasan strategis pembangunan (KEK, KPI,Kawasan Pangan, Perikanan, Perkotaan, Perdesaan) 2. Penyusunan skema pemanfaatan kawasan di kawasan strategis pembangunan 3. Pengembangan kawasan sentra produksi dan distribusi pangan 4. Penyiapan pilot klaster ekonomi hijau dan ekonomi kreatif 5. Penguatan integrasi ekonomi antarwilayah dan mitra IKN	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	
2.1.2	Permendagri No. 96 Tahun 2027 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa		Memfasilitasi Kesepakatan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	
2.1.3	Permendes No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan		Penyusunan Dokumen Monitoring Evaluasi Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan	
3	Tema 3: Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Keluarga, dan Layanan Dasar Desa			
3.1	Bidang Pemberdayaan Masyarakat & Pengembangan Ekonomi Desa			
3.1.1	Permendagri No. 119 Tahun 2019 Tentang Potongan Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1. Penguatan potensi usaha pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata 2. Penyiapan pilot klaster ekonomi hijau dan ekonomi kreatif 3. Penguatan integrasi ekonomi antarwilayah dan mitra IKN	Pemberian BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	
3.1.2	Perbup No. 6 Tahun 2023 Tentang Gugus Tugas Pendamping Desa Kukar Idaman, Perbup No. 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Perbup No. 6 Tahun 2023 Tentang Gugus Tugas Pendamping Desa Kukar Idaman		Peningkatan Kapasitas Pendekar	
3.1.3	Permendagri 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Ketua RT, Kader Posyandu, PKK, LPM dan Karang Taruna serta Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
3.1.4	Perbup Kutai Kartanegara 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan		Pelaksanaan Lomba RT Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten		
			Memfasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		
3.1.5	Permendagri 13 Tahun 2024 tentang Posyandu		Pelaksanaan Lomba Posyandu Tingkat Desa/Kelurahan,Kecamatan dan Kabupaten		
Pembangunan Gedung Posyandu					
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu yang berstandart	
3.1.6	Permendagri 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat		Pengakuan dan Pembinaan Masyarakat Hukum Adat		
3.1.7	Perda Prov Kaltim Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Provinsi Kalimantan Timur				
3.1.8	Permendagri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat baik Tingkat Desa/Kelurahan,Kecamatan dan Kabupaten		
4	Tema 4: Penguatan Ekonomi Desa dan Inovasi Perdesaan				
4.1	Bidang Pemberdayaan Masyarakat & Pengembangan Ekonomi Desa				
4.1.1	PP No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Perbup No. 2 Tahun 2025 Tentang Kemitraan Badan Usaha Milik Desa/BUMDESMA dengan Perusahaan	1. Penguatan potensi usaha pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata 2. Penyiapan pilot klaster ekonomi hijau dan ekonomi kreatif 3. Penguatan integrasi ekonomi antarwilayah dan mitra IKN	Pendampingan BUMDesa dalam mengelola Unit Usaha		
4.1.2	Perbup No. 29 Tahun 2024 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Klinik Konsultasi Desa		Pengembangan Klinik Konsultasi Desa		

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.1.3	Permendesa PDTT Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa		Pendampingan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
4.1.4	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,Kecil dan Menengah		Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pengembangan Ekonomi Desa	
4.1.5	Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah		Pelatihan Kewirausahaan di Perdesaan , Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kewirausahaan	
4.1.6	Perbup Kutai Kartanegara Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD		Pelatihan kewirausahaan dan keterampilan kerja bagi rumah tangga miskin	

Arah kebijakan DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 merupakan turunan dari arah kebijakan RPJMD, dengan menempatkan desa sebagai pusat transformasi pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berbasis kewilayahan. Untuk memastikan implementasi yang sistematis, telah ditetapkan arah kebijakan DPMD yang dikelompokkan ke dalam 4 tema, yaitu:

- 1. Penguatan Penataan dan Kelembagaan Desa
- 2. Penguatan Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan
- 3. Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Keluarga, dan Layanan Dasar Desa
- 4. Penguatan Ekonomi Desa dan Inovasi Perdesaan

Keempat tema ini diselaraskan dengan pendekatan kewilayahan (Utara, Selatan, Timur, Transisi IKN) serta tema pembangunan tahunan RPJMD 2026–2030 agar arah kebijakan progresif dan berkesinambungan.

Penjelasan masing-masing tema, yaitu:

- 1. Penguatan Penataan dan Kelembagaan Desa

Tema ini menitikberatkan pada penataan regulasi,

administrasi, data, dan kewenangan desa agar tata kelola pemerintahan desa berjalan transparan, akuntabel, dan terintegrasi dengan sistem birokrasi daerah. Arah kebijakan meliputi: pendampingan desa persiapan dan penamaan kode desa, penataan wilayah dan penegasan batas desa, penyusunan regulasi teknis (Perbup ADD, BHPRD, APBDesa, SILTAP, SOTK, Pilkades), pembinaan perencanaan desa, evaluasi APBDesa, analisis IDM/ID, serta pendataan melalui aplikasi EPDesKel. Zona Utara difokuskan pada desa pertanian dan perkebunan; Zona Selatan pada desa pesisir; Zona Timur pada desa wisata dan agroindustri; dan Zona Transisi IKN diarahkan pada percepatan adaptasi desa mitra IKN.

2. Penguatan Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan

Tema ini menegaskan bahwa desa adalah bagian dari pembangunan kawasan strategis. Arah kebijakan mencakup fasilitasi kerjasama antar desa, kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga, dan penyusunan dokumen monitoring serta evaluasi kawasan perdesaan.

Kerjasama di Zona Utara diarahkan untuk kawasan pertanian terpadu; di Zona Selatan untuk perikanan dan logistik maritim; di Zona Timur untuk wisata pedesaan; dan di Zona Transisi IKN untuk kawasan perdesaan penyangga IKN.

3. Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Keluarga, dan Layanan Dasar Desa

Tema ini berfokus pada peningkatan kapasitas aparatur, kader desa, kelembagaan sosial, serta pemenuhan layanan dasar masyarakat desa. Arah kebijakan mencakup pemberian BPJS bagi kepala desa, perangkat desa, dan BPD; peningkatan kapasitas Pendekar; pelatihan bagi Ketua RT, kader Posyandu, PKK, LPM, Karang Taruna, lembaga adat, serta masyarakat hukum adat; fasilitasi TP-PKK; pelaksanaan lomba RT dan Posyandu; pembangunan dan pengadaan sarpras Posyandu berstandar; pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat; serta pengakuan dan pembinaan masyarakat hukum adat.

Zona Utara diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan berbasis komunitas; Zona Selatan untuk layanan kesehatan masyarakat pesisir; Zona Timur untuk integrasi dengan

desa wisata dan pelestarian budaya; dan Zona Transisi IKN diarahkan pada pembinaan masyarakat adat agar tetap eksis di tengah arus modernisasi.

4. Penguatan Ekonomi Desa dan Inovasi Perdesaan

Tema ini diarahkan untuk memperkuat transformasi ekonomi desa berbasis BUMDes, pasar desa, inovasi, dan kewirausahaan. Arah kebijakan meliputi pendampingan BUMDes, pengembangan klinik konsultasi desa, pemanfaatan teknologi tepat guna, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan untuk pengembangan ekonomi, serta pelatihan kewirausahaan dan keterampilan kerja bagi rumah tangga miskin.

Zona Utara difokuskan pada agro dan perkebunan; Zona Selatan pada perikanan dan hasil laut; Zona Timur pada wisata dan agroindustri; sementara Zona Transisi IKN diarahkan untuk usaha desa penopang logistik, pangan, energi, dan pariwisata hijau.

Dengan demikian, arah kebijakan Renstra DPMD 2025–2029 telah dipetakan sesuai bidang tugas dalam Peraturan Bupati No 59 Tahun 2023, diselaraskan dengan RPJMD, serta diproyeksikan dalam kerangka kewilayahan dan tema pembangunan tahunan. Hal ini memastikan keterhubungan antara dokumen teknis perangkat daerah dengan arah pembangunan makro daerah.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penjabaran tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara, dituangkan secara lebih operasional ke dalam bentuk program, kegiatan, dan subkegiatan yang disertai indikator kinerja, target, serta pendanaan indikatif untuk periode lima tahun. Penyusunan program, kegiatan, subkegiatan dan pendanaan dilakukan dengan mengedepankan beberapa pendekatan utama, yaitu:

1. Pendekatan kinerja, melalui penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM) dan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu;
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif sebagai dasar alokasi sumber daya secara efisien dan terukur; dan
3. Prioritas program berdasarkan urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
4. Mendukung pelaksanaan program prioritas bupati dan wakil bupati.

4.1. Uraian Program

Dalam konteks ini, program diartikan sebagai sekumpulan kegiatan yang terstruktur, sistematis, dan terpadu, yang dapat dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, bekerja sama dengan masyarakat, atau melalui partisipasi aktif masyarakat, untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, termasuk di dalamnya program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun mendatang. Program, kegiatan, dan subkegiatan tersebut disusun dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan. Adapun rencana Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut.

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENATAAN DESA
3. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
4. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA
ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

4.2. Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang memanfaatkan sumber daya yang ada guna mewujudkan capaian program dan sasaran yang dirumuskan. Penyusunan kegiatan dan sub kegiatan mempertimbangkan tingkat urgensi dan efektivitasnya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Adapun rencana Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut.

- i. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- ii. PROGRAM PENATAAN DESA
 1. Penyelenggaraan Penataan Desa
- iii. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
 1. Fasilitasi Kerja sama antar Desa
- iv. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
 1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- v. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,

LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

4.3. Uraian Subkegiatan

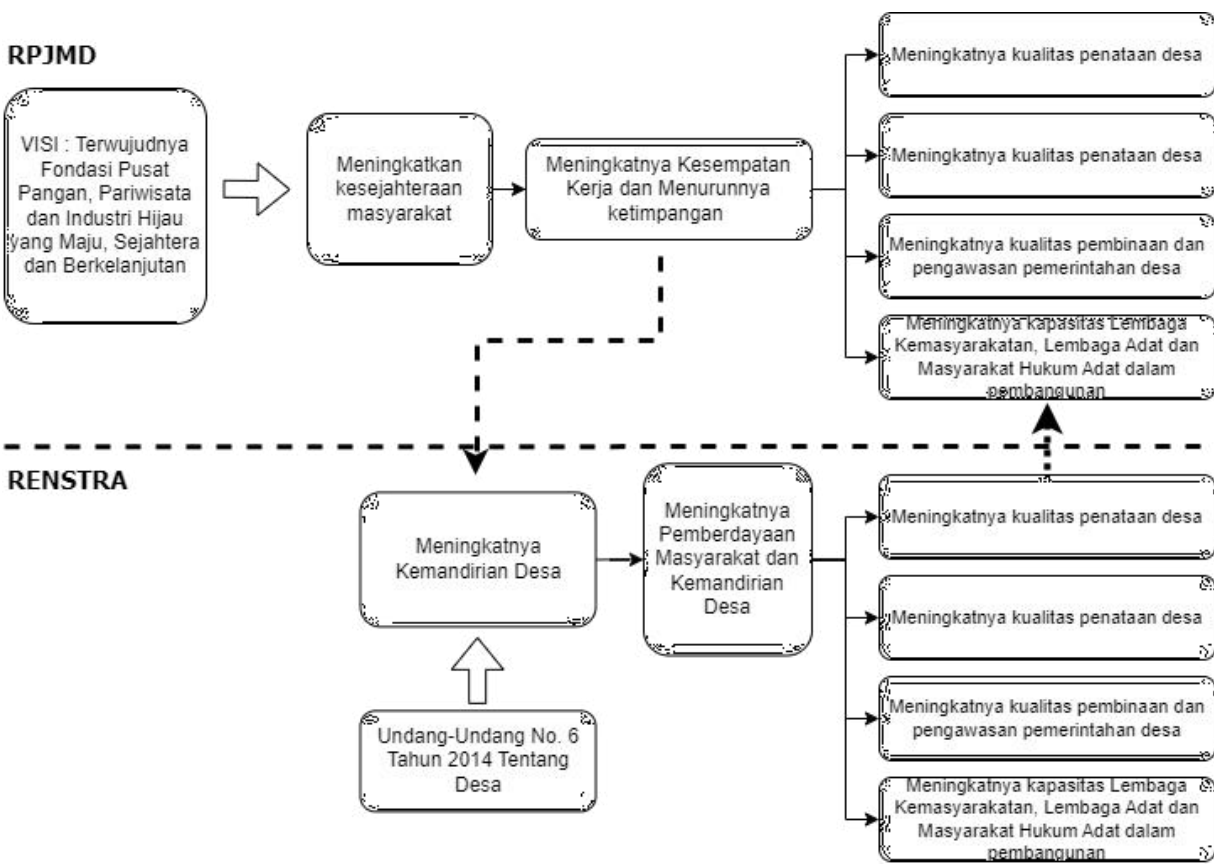
Subkegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Subkegiatan dalam rencana pembangunan jangka menengah DPMD tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki 6 (enam) subkegiatan
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memiliki 4 (empat) subkegiatan
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah memiliki 3 (tiga) subkegiatan
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah memiliki 3 (tiga) subkegiatan
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki 7 (tujuh) subkegiatan
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah memiliki 2 (dua) subkegiatan
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki 3 (tiga) subkegiatan
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki 5 (lima) subkegiatan
9. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa memiliki 5 (lima) subkegiatan
10. Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa memiliki 3 (tiga) subkegiatan
11. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa memiliki 18 (delapan belas) subkegiatan
12. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota memiliki 10 (sepuluh) subkegiatan.

Penentuan program, kegiatan, dan subkegiatan dilakukan berdasarkan kinerja (hasil/outcome dan keluaran/output) yang akan dihasilkan/dicapai. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak). Setiap kinerja akan diukur dengan indikator. Indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Sementara itu, kelompok sasaran kegiatan harus dirumuskan secara spesifik dan rinci agar memberikan kejelasan mengenai siapa yang akan menerima manfaat langsung dari pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Adapun kerangka perumusan program, kegiatan dan subkegiatan berdasarkan cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra DPMD

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
- Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Menurunnya Ketimpangan - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kemandirian Desa				Persentase Desa Mandiri (%)		
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa			Persentase Desa Berkembang dan Maju Menuju Mandiri (%)		
			Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai)	2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	
				Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)		
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.13.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	2.13.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kinerja SKPD (Laporan)		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.13.01.2.01.00 07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.13.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.13.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.13.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	2.13.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.13.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.13.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Tersedianya Laporan Pengelolaan dan Penggunaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang	2.13.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Milik Daerah SKPD (Laporan)		
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.13.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.13.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.13.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2.13.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.13.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					(Laporan)		
				Tersedianya ASN yang telah ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	2.13.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.13.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.13.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.13.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.13.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	2.13.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Peraturan Perundang- Undangan (Orang)		
				Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					(Paket)		
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang	2.13.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Disediakan (Dokumen)		
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.13.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.13.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.13.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya Pengadaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit	2.13.01.2.07.0001 -	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	2.13.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.13.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi (Unit)	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi (Unit)	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.13.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.13.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan	2.13.01.2.09.0006 -	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi (Unit)	2.13.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi (Unit)	2.13.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas penataan desa		Persentase Fasilitasi Penataan Desa (%)	2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA	
				Terselenggaranya penataan desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa	
					Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa (Desa)	2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)	2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa	
					Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa	
					Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	2.13.02.2.01.0001 - Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	
					Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	2.13.02.2.01.0002 - Fasilitas Tata Wilayah Desa	
					Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)	2.13.02.2.01.0003 - Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	
					Jumlah Desa	2.13.02.2.01.0004 -	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa (Desa)	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	2.13.02.2.01.0006 - Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa		Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (%)	2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	
				Terfasilitasinya kerja sama antar desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar	2.13.03.2.01.0001 - Fasilitasi Kerja Sama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.13.03.2.01.0002 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	2.13.03.2.01.0003 - Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
					Persentase Fasilitasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa (%)	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
				Jumlah Desa yang dibina dan diawasi dalam Penyelenggaraan Administrasi	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Pemerintahan Desa	Kapasitas (Orang)	Pemerintahan Desa	
					Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen	2.13.04.2.01 -	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Penugasan	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa (Dokumen)	Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan	2.13.04.2.01 -	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0001 - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0002 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan	2.13.04.2.01.0004 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Keuangan Desa (Dokumen)		
					Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)	2.13.04.2.01.0006 - Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0007 - Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pangkat dan Pemberhentian	2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pangkat dan Pemberhentian Kepala Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kepala Desa (Laporan)		
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pangangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	2.13.04.2.01.0010 - Fasilitasi Pangangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	2.13.04.2.01.0011 - Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0012 - Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0013 - Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	
					Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	2.13.04.2.01.0014 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	
					Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	2.13.04.2.01.0015 - Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					(Desa)		
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	2.13.04.2.01.0016 - Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0017 - Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	2.13.04.2.01.0018 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan		Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD/K) (%)	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
					Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Desa/Kelurahan (LAD/K) dan Masyarakat Hukum Adat (%)	LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
				Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	2.13.05.2.01.0001 - Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	2.13.05.2.01.0002 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit)	2.13.05.2.01.0004 - Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	2.13.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
					Jumlah Laporan	2.13.05.2.01.0006 -	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	2.13.05.2.01.0007 - Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen)	2.13.05.2.01.0008 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti	2.13.05.2.01.0010 - Peningkatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator kinerja, dan pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				66.871.585.511,00		100.335.258.800,41		102.009.736.408,36		104.015.634.480,43		105.406.920.761,45		
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				18.753.414.441,00		19.523.533.840,41		21.265.002.182,36		21.360.002.182,43		21.360.002.182,45		
Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai)	66,74	78	18.753.414.441,00	80	19.523.533.840,41	82	21.265.002.182,36	84	21.360.002.182,43	85	21.360.002.182,45	2.13.0.00.0.00.01.000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				575.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		
Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	1	575.000.000,00	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1					
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1		1		1		1		1					
2.13.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00				
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00				
2.13.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00				
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00				
2.13.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00				
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00				
2.13.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00				
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00				
2.13.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00				
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				25.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				16.467.676.941,00		15.496.769.182,41		15.496.769.182,36		15.496.769.182,43		15.496.769.182,45		
Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.217	2.142	16.467.676.941,00	2.142	15.496.769.182,41	2.142	15.496.769.182,36	2.142	15.496.769.182,43	2.142	15.496.769.182,45		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12					
2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				16.217.676.941,00		15.091.354.782,41		15.091.354.782,36		15.091.354.782,43		15.091.354.782,45		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.217	2.142	16.217.676.941,00	2.142	15.091.354.782,41	2.142	15.091.354.782,36	2.142	15.091.354.782,43	2.142	15.091.354.782,45		
2.13.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				25.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.13.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
				200.000.000,00		305.414.400,00		305.414.400,00		305.414.400,00		305.414.400,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	200.000.000,00	12	305.414.400,00	12	305.414.400,00	12	305.414.400,00	12	305.414.400,00		
2.13.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				25.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.13.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				50.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		
Tersedianya Laporan Pengelolaan dan Penggunaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	1	50.000.000,00	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5	6		6		6		6		6			
2.13.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5	6	25.000.000,00	6	25.000.000,00	6	25.000.000,00	6	25.000.000,00	6	25.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	1	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.13.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	4	25.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00		
2.13.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100.000.000,00		605.000.000,00		960.000.000,00		960.000.000,00		960.000.000,00		
Tersedianya ASN yang telah ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	170	100.000.000,00	150	605.000.000,00	300	960.000.000,00	300	960.000.000,00	300	960.000.000,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	183	170		100		100		100					
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)				150		150		150					
2.13.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0,00		255.000.000,00		510.000.000,00		510.000.000,00		510.000.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	170	0,00	150	255.000.000,00	300	510.000.000,00	300	510.000.000,00	300	510.000.000,00		
2.13.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				100.000.000,00		250.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	183	170	100.000.000,00	100	250.000.000,00	100	350.000.000,00	100	350.000.000,00	100	350.000.000,00		
2.13.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			0,00	150	100.000.000,00	150	100.000.000,00	150	100.000.000,00	150	100.000.000,00		
2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				660.000.000,00		1.545.000.000,00		1.883.806.000,00		1.933.806.000,00		1.933.806.000,00		
Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	50	4	660.000.000,00	4	1.545.000.000,00	4	1.883.806.000,00	4	1.933.806.000,00	4	1.933.806.000,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		1				1				1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	1				1				1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10	1				1				1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12				12				12			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	240	200				400				500			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	4				3				3			
2.13.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000,00		100.000.000,00		208.806.000,00		208.806.000,00		208.806.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	208.806.000,00	1	208.806.000,00	1	208.806.000,00		
2.13.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				200.000.000,00		825.000.000,00		825.000.000,00		825.000.000,00		825.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10	1	200.000.000,00	1	825.000.000,00	1	825.000.000,00	1	825.000.000,00	1	825.000.000,00		
2.13.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				40.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	4	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00		
2.13.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150.000.000,00		300.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	150.000.000,00	12	300.000.000,00	12	450.000.000,00	12	450.000.000,00	12	450.000.000,00		
2.13.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	240	200	100.000.000,00	400	150.000.000,00	500	200.000.000,00	600	250.000.000,00	600	250.000.000,00		
2.13.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				70.000.000,00		70.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	50	4	70.000.000,00	4	70.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00		
2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00		154.803.000,00		530.975.000,00		555.975.000,00		555.975.000,00		
Tersedianya Pengadaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	9	338	0,00	13	154.803.000,00	15	530.975.000,00	20	555.975.000,00	20	555.975.000,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	9	2		0		5		2		2			
2.13.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		222.375.000,00		227.375.000,00		227.375.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	9	2	0,00	0	0,00	5	222.375.000,00	2	227.375.000,00	2	227.375.000,00		
2.13.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		154.803.000,00		308.600.000,00		328.600.000,00		328.600.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	9	338	0,00	13	154.803.000,00	15	308.600.000,00	20	328.600.000,00	20	328.600.000,00		
2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				400.000.000,00		405.782.000,00		505.782.000,00		505.782.000,00		505.782.000,00		
Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	1	400.000.000,00	1	405.782.000,00	1	505.782.000,00	1	505.782.000,00	1	505.782.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	0											
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	12		12		12		12					
2.13.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				300.000.000,00		205.782.000,00		205.782.000,00		205.782.000,00		205.782.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	12	300.000.000,00	12	205.782.000,00	12	205.782.000,00	12	205.782.000,00	12	205.782.000,00		
2.13.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
2.13.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				500.737.500,00		611.179.658,00		1.182.670.000,00		1.202.670.000,00		1.202.670.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	500.737.500,00	1	611.179.658,00	1	1.182.670.000,00	1	1.202.670.000,00	1	1.202.670.000,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	3		1		1		1					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	33		33		33		33		33				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	82	98		154		154		154						
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	1		1		1		1						
2.13.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.000.000,00		115.299.658,00		376.790.000,00		386.790.000,00		386.790.000,00			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	33	100.000.000,00	33	115.299.658,00	33	376.790.000,00	33	386.790.000,00	33	386.790.000,00			
2.13.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				275.737.500,00		270.760.000,00		275.760.000,00		280.760.000,00		280.760.000,00			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	3	275.737.500,00	1	270.760.000,00	1	275.760.000,00	1	280.760.000,00	1	280.760.000,00			
2.13.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				75.000.000,00		125.120.000,00		130.120.000,00		135.120.000,00		135.120.000,00			
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	82	98	75.000.000,00	154	125.120.000,00	154	130.120.000,00	154	135.120.000,00	154	135.120.000,00			
2.13.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00			
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.13.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		50.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00			
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	1	0,00	1	50.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00			
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA				2.550.000.000, 00		775.000.000,00		2.600.000.000,0 0		4.238.188.428,0 0		2.150.000.000,0 0			
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa (%)	29,16	50,00	2.550.000.000, 00	66,67	775.000.000,00	83,33	2.600.000.000,0 0	100	4.238.188.428,0 0	100	2.150.000.000,0 0	2.13.0.00.0.00.01.0 000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa				2.550.000.000, 00		775.000.000,00		2.600.000.000,0 0		4.238.188.428,0 0		2.150.000.000,0 0			
Terselenggaranya penataan desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)	22	193	2.550.000.000, 00	193	775.000.000,00	193	2.600.000.000,0 0	193	4.238.188.428,0 0	193	2.150.000.000,0 0			
	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	2	193		193		193		193						
	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	3.775	20		2		50		60		40				
	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa (Desa)	1	8		8		8		8		8				
	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	3	7		8		8		8		8				
2.13.02.2.01.0001 - Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				75.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00			
Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	3	7	75.000.000,00	8	100.000.000,00	8	200.000.000,00	8	250.000.000,00	8	250.000.000,00			
2.13.02.2.01.0002 - Fasilitasi Tata Wilayah Desa				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitas Penataan Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	2	193	200.000.000,00	193	200.000.000,00	193	200.000.000,00	193	200.000.000,00	193	200.000.000,00		
2.13.02.2.01.0003 - Fasilitas Penataan Kewenangan Desa				200.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)	22	193	200.000.000,00	193	100.000.000,00	193	100.000.000,00	193	100.000.000,00	193	100.000.000,00		
2.13.02.2.01.0004 - Fasilitas Penamaan dan Kode Desa				75.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa (Desa)	1	8	75.000.000,00	8	75.000.000,00	8	100.000.000,00	8	100.000.000,00	8	100.000.000,00		
2.13.02.2.01.0006 - Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa				2.000.000.000, 00		300.000.000,00		2.000.000.000,0 0		3.588.188.428,0 0		1.500.000.000,0 0		
Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	3.775	20	2.000.000.000, 00	2	300.000.000,00	50	2.000.000.000,0 0	60	3.588.188.428,0 0	40	1.500.000.000,0 0		
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				435.000.000,00		1.300.000.000,0 0		1.400.000.000,0 0		1.500.000.000,0 0		1.500.000.000,0 0	2.13.0.00.0.00.01.0 000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa (%)	33,33	50,00	435.000.000,00	66,67	1.300.000.000,0 0	83,33	1.400.000.000,0 0	91,67	1.500.000.000,0 0	100	1.500.000.000,0 0		
2.13.03.2.01 - Fasilitas Kerja Sama antar Desa				435.000.000,00		1.300.000.000,0 0		1.400.000.000,0 0		1.500.000.000,0 0		1.500.000.000,0 0		
Terfasilitasinya kerja sama antar desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	8	5	435.000.000,00	4	1.300.000.000,0 0	4	1.400.000.000,0 0	4	1.500.000.000,0 0	4	1.500.000.000,0 0		
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	5	3		5		5		5					
	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	12	5		5		5		4					
2.13.03.2.01.0001 - Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				125.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	12	5	125.000.000,00	5	200.000.000,00	5	250.000.000,00	5	300.000.000,00	4	300.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.03.2.01.0002 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				100.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	8	5	100.000.000,00	4	200.000.000,00	4	250.000.000,00	4	300.000.000,00	4	300.000.000,00		
2.13.03.2.01.0003 - Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				210.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	5	3	210.000.000,00	5	900.000.000,00	5	900.000.000,00	5	900.000.000,00	5	900.000.000,00		
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				21.194.043.870 ,00		28.003.472.960, 00		25.063.164.226, 00		25.794.193.870, 00		29.413.108.579, 00		
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	9,79	10,79	21.194.043.870 ,00	16,25	28.003.472.960, 00	17,22	25.063.164.226, 00	21,55	25.794.193.870, 00	27,53	29.413.108.579, 00	2.13.0.00.0.00.01.0 000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa (%)	100	100		100		100		100		100			
2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				21.194.043.870 ,00		28.003.472.960, 00		25.063.164.226, 00		25.794.193.870, 00		29.413.108.579, 00		
Jumlah Desa yang dibina dan diawasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	43	18	21.194.043.870 ,00	18	28.003.472.960, 00	18	25.063.164.226, 00	18	25.794.193.870, 00	18	29.413.108.579, 00		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	23	25		26		27		28		28			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)				20		20		20		20			
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	20	37		40		40		40		40			
	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)				115						86			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa)	9	15		15		15		15		15			
	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	18	18		18		20		20		20			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa (Dokumen)	43	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	55	54		54		54		54		54			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	42	27		27		27		27		27			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	15		20		40		40		40			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	8	7		7		7		7		7			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	82	113		122		123		123		122			
	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa (Dokumen)	2	1		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	26	8		8		8		8		8			
	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	1.540	60		60		150		150		150			
	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	32	58		58		58		58		58			
	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	14	10		10		15		15		15			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.04.2.01.0001 - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	26	8	100.000.000,00	8	100.000.000,00	8	100.000.000,00	8	100.000.000,00	8	100.000.000,00		
2.13.04.2.01.0002 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	8	7	100.000.000,00	7	100.000.000,00	7	100.000.000,00	7	100.000.000,00	7	100.000.000,00		
2.13.04.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				125.000.000,00		125.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	15	125.000.000,00	20	125.000.000,00	40	250.000.000,00	40	250.000.000,00	40	250.000.000,00		
2.13.04.2.01.0004 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				7.285.720.910, 00		7.000.000.000,0 0		7.509.691.266,0 0		7.885.720.910,0 0		7.854.635.619,0 0		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	42	27	7.285.720.910, 00	27	7.000.000.000,0 0	27	7.509.691.266,0 0	27	7.885.720.910,0 0	27	7.854.635.619,0 0		
2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	32	58	200.000.000,00	58	200.000.000,00	58	200.000.000,00	58	200.000.000,00	58	200.000.000,00		
2.13.04.2.01.0006 - Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa				0,00		100.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)			0,00	20	100.000.000,00	20	250.000.000,00	20	250.000.000,00	20	250.000.000,00		
2.13.04.2.01.0007 - Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	14	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	15	75.000.000,00	15	75.000.000,00	15	75.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				300.000.000,00		2.800.000.000,00		3.300.000.000,00		3.300.000.000,00		3.250.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	82	113	300.000.000,00	122	2.800.000.000,00	123	3.300.000.000,00	123	3.300.000.000,00	122	3.250.000.000,00		
2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				0,00		4.500.000.000,00		0,00		0,00		4.000.000.000,00		
Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)			0,00	115	4.500.000.000,00		0,00		0,00	86	4.000.000.000,00		
2.13.04.2.01.0010 - Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	23	25	60.000.000,00	26	65.000.000,00	27	70.000.000,00	28	75.000.000,00	28	75.000.000,00		
2.13.04.2.01.0011 - Fasilitasi Penyusunan Profil Desa				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	43	18	100.000.000,00	18	100.000.000,00	18	100.000.000,00	18	150.000.000,00	18	100.000.000,00		
2.13.04.2.01.0012 - Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa				12.058.472.960,00		12.058.472.960,00		12.058.472.960,00		12.258.472.960,00		12.058.472.960,00		
Terlaksananya Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa (Dokumen)	43	4	12.058.472.960,00	4	12.058.472.960,00	4	12.058.472.960,00	4	12.258.472.960,00	4	12.058.472.960,00		
2.13.04.2.01.0013 - Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	55	54	100.000.000,00	54	100.000.000,00	54	100.000.000,00	54	150.000.000,00	54	100.000.000,00		
2.13.04.2.01.0014 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				100.000.000,00		100.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	1.540	60	100.000.000,00	60	100.000.000,00	150	250.000.000,00	150	250.000.000,00	150	250.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.04.2.01.0015 - Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa				180.000.000,00		125.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa)	9	15	180.000.000,00	15	125.000.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00		
2.13.04.2.01.0016 - Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa				179.850.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	20	37	179.850.000,00	40	150.000.000,00	40	150.000.000,00	40	150.000.000,00	40	150.000.000,00		
2.13.04.2.01.0017 - Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa				75.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa (Dokumen)	2	1	75.000.000,00	2	150.000.000,00	2	200.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00		
2.13.04.2.01.0018 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				180.000.000,00		180.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	18	18	180.000.000,00	18	180.000.000,00	20	200.000.000,00	20	200.000.000,00	20	200.000.000,00		
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				23.939.127.200 ,00		50.733.252.000, 00		51.681.570.000, 00		51.123.250.000, 00		50.983.810.000, 00		
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD/K) (%)	98,12	100	23.939.127.200 ,00	100	50.733.252.000, 00	100	51.681.570.000, 00	100	51.123.250.000, 00	100	50.983.810.000, 00	2.13.0.00.0.00.01.0 000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan (LAD/K) dan Masyarakat Hukum Adat (%)	3,30	100				100				100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				23.939.127.200 ,00		50.733.252.000, 00		51.681.570.000, 00		51.123.250.000, 00		50.983.810.000, 00		
Terfasilitasinya Lembaga dan Masyarakat dalam penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Keterlibatan dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen)	1	1	23.939.127.200 ,00	1	50.733.252.000, 00	1	51.681.570.000, 00	1	51.123.250.000, 00	1	50.983.810.000, 00		
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	9	1		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit)	1.392	58.596		300		300		300		300			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	7.697	3.320		4.995		4.995		4.995		4.995			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	3	2		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	1	2		4		4		4		4			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	0	40		40		40		40		40			
	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	19	1		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	1	1		3		3		3		3			
2.13.05.2.01.0001 - Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				100.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	150.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00		
2.13.05.2.01.0002 - Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	19	1	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	250.000.000,00	4	250.000.000,00		
2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				2.274.167.200,00		25.825.332.000,00		24.465.330.000,00		24.465.330.000,00		24.465.330.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	7.697	3.320	2.274.167.200,00	4.995	25.825.332.000,00	4.995	24.465.330.000,00	4.995	24.465.330.000,00	4.995	24.465.330.000,00		
2.13.05.2.01.0004 - Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				18.614.960.000,00		22.657.920.000,00		24.066.240.000,00		22.657.920.000,00		22.668.480.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit)	1.392	58.596	18.614.960.000,00	300	22.657.920.000,00	300	24.066.240.000,00	300	22.657.920.000,00	300	22.668.480.000,00		
2.13.05.2.01.0005 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				400.000.000,00		250.000.000,00		350.000.000,00		500.000.000,00		400.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	3	3	400.000.000,00	3	250.000.000,00	3	350.000.000,00	3	500.000.000,00	3	400.000.000,00		
2.13.05.2.01.0006 - Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				450.000.000,00		300.000.000,00		450.000.000,00		500.000.000,00		450.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	3	2	450.000.000,00	3	300.000.000,00	3	450.000.000,00	3	500.000.000,00	3	450.000.000,00		
2.13.05.2.01.0007 - Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				200.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	1	2	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	250.000.000,00	4	250.000.000,00	4	250.000.000,00		
2.13.05.2.01.0008 - Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.13.05.2.01.0009 - Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1.500.000.000,00		1.000.000.000,00		1.500.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	9	1	1.500.000.000,00	5	1.000.000.000,00	5	1.500.000.000,00	5	2.000.000.000,00	5	2.000.000.000,00		
2.13.05.2.01.0010 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				150.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	0	40	150.000.000,00	40	150.000.000,00	40	200.000.000,00	40	200.000.000,00	40	200.000.000,00		

4.4. Uraian Subkegiatan Dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran RPJMD, maka pemerintah daerah menetapkan program prioritas pembangunan daerah. Beberapa program perangkat daerah di DPMD merupakan program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimuat dalam RPJMD. Adapun program perangkat daerah yang menjadi program prioritas meliputi: Program Administrasi Pemerintahan Desa; Program Penataan Desa; Program Peningkatan Kerjasama Desa; dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Selain itu, program-program DPMD juga mendukung pelaksanaan program dedikasi bupati, yaitu: Program Makan Bergizi Gratis untuk Balita dan Lansia; Program Etam Sejahtera; Program Kredit Kukar Idaman Terbaik; Program 100 Milyar bagi Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik; Program RT Ku-Terbaik; dan Program Permukiman Idaman Terbaik. Adapun kegiatan utama yang dilakukan adalah melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap pemerintah desa, melakukan dukungan kebijakan melalui penguatan fiskal pemerintah desa melalui BKKD, baik dalam penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan SDM, penguatan kelembagaan, serta promosi dan pemasaran hasil produk BUMDes. Dengan Mengalokasikan anggaran dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan sebesar 100 Milyar Per Tahun. Kondisi ini ditopang pula dengan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar desa dan kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS		PROGRAM DEDIKASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
1	Program Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Meningkatnya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa		Program 100 Milyar bagi Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik	1. Review Perbup Kawasan Perdesaan 2. Pendampingan Pembentukan dan Pembinaan Kelembagaan Kawasan Perdesaan 3. Penyediaan Sistem Pemantauan Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Web
			1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota		
			2	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			
			1	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Program Etam Sejahtera	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
					Program Permukiman Idaman Terbaik	Pembangunan PLTS Komunal di wilayah Tak Terjangkau PLN
			2	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Program Kredit Kukar Idaman Terbaik	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan BUMDesa
					Program Permukiman Idaman Terbaik	Pendampingan kelembagaan pengelolaan listrik dan air bersih desa
			3	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Program RT Ku-Terbaik	Pembentukan dan Operasionalisasi Pengendali dan Pendamping Pelaksanaan Program RT

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS		PROGRAM DEDIKASI	KETERANGAN
3	Program Penataan Desa	Meningkatnya kualitas penataan desa	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa			
			1	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Program Permukiman Idaman Terbaik	Pembangunan PLTS Komunal di wilayah Tak Terjangkau PLN
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya fasilitasi Lembaga dan Masyarakat dalam Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
			1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Program Makan Bergizi Gratis untuk Balita dan Lansia	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan/PKK/RT/LPM dalam penyediaan makanan bergizi
					Program RT Ku-Terbaik	Penyediaan Pedoman Teknis Pelaksanaan Program RT
			2	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Program Makan Bergizi Gratis untuk Balita dan Lansia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Posyandu

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS		PROGRAM DEDIKASI	KETERANGAN
			3	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Program RT Ku-Terbaik	Pembentukan Lembaga Pengendali dan Pendamping Pelaksanaan Program RT

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Strategis Kepala Daerah

NO.	PROGRAM STRATEGIS KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS (Nomenklatur dalam SIPD)	TERMUAT DALAM RENSTRA PD (✓/X)	KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Nomenklatur dalam SIPD)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program 100 Milyar bagi Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik	2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	✓	2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	
			✓	2.13.03.2.01.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1. Review Perbup Kawasan Perdesaan 2. Pendampingan Pembentukan dan Pembinaan Kelembagaan Kawasan Perdesaan 3. Penyediaan Sistem Pemantauan Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Web
			✓	2.13.03.2.01.0003 - Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	

NO.	PROGRAM STRATEGIS KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS (Nomenklatur dalam SIPD)	TERMUAT DALAM RENSTRA PD (✓/X)	KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Nomenklatur dalam SIPD)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Program Etam Sejahtera	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	✓	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
			✓	2.13.04.2.01.0017 - Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
3	Program Permukiman Idaman Terbaik	2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA	✓	2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa	
			✓	2.13.02.2.01.0006 - Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Pembangunan PLTS Komunal di wilayah Tak Terjangkau PLN
		2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	✓	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
			✓	2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Pendampingan kelembagaan pengelolaan listrik dan air bersih desa
			✓	2.13.04.2.01.0017 - Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Pembangunan PLTS Komunal di wilayah Tak Terjangkau PLN
4	Program Kredit Kukar Idaman Terbaik	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	✓	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	

NO.	PROGRAM STRATEGIS KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS (Nomenklatur dalam SIPD)	TERMUAT DALAM RENSTRA PD (✓/X)	KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Nomenklatur dalam SIPD)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			✓	2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan BUMDesa
5	Program RT Ku-Terbaik	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	✓	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
			✓	2.13.04.2.01.0012 - Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Pembentukan dan Operasionalisasi Pengendali dan Pendamping Pelaksanaan Program RT
		2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	✓	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NO.	PROGRAM STRATEGIS KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS (Nomenklatur dalam SIPD)	TERMUAT DALAM RENSTRA PD (✓/X)	KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Nomenklatur dalam SIPD)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			✓	2.13.05.2.01.0002 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Pembentukan Lembaga Pengendali dan Pendamping Pelaksanaan Program RT
			✓	2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penyediaan Pedoman Teknis Pelaksanaan Program RT
6	Program Makan Bergizi Gratis untuk Balita dan Lansia	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	✓	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			✓	2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan/PKK/RT/LPM dalam penyediaan makanan bergizi

NO.	PROGRAM STRATEGIS KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS (Nomenklatur dalam SIPD)	TERMUAT DALAM RENSTRA PD (√/X)	KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Nomenklatur dalam SIPD)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			√	2.13.05.2.01.0004 - Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Posyandu

4.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. Adapun rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Desa Mandiri	Persen	45,08	47,67	52,33	56,48	61,14	66,32	72,02	
2	Persentase Desa Berkembang dan Maju Menuju Mandiri	Persen	9,40	6,60	8,08	8,79	10,98	13,70	18,64	

4.6. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. Adapun rumusan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Desa Mandiri	Persen	45,08	47,67	52,33	56,48	61,14	66,32	72,02	
2	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	Persen	33,33	33,33	50,00	66,67	83,33	91,67	100,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
- 2) Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor B-2838/BAPP/065.11/06/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penyusunan Renstra ini dilaksanakan melalui berbagai tahapan dan proses partisipatif, melibatkan pemangku kepentingan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu, penyusunan juga memperhatikan hasil analisis perkembangan desa di Kabupaten Kutai Kartanegara, termasuk capaian penilaian status desa berdasarkan klasifikasi Desa Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal, dan Sangat Tertinggal.

Sebagai bagian dari proses penjaminan mutu perencanaan, dokumen Renstra ini telah melalui Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memberikan masukan strategis terkait keselarasan substansi, kelengkapan dokumen, serta keterkaitan antara program, kegiatan, dan indikator kinerja dengan tujuan pembangunan daerah. Reviu APIP ini memperkuat posisi Renstra sebagai dokumen yang akuntabel, terukur, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Renstra ini disusun untuk memberikan arah strategis dan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan urusan dan tugas serta fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menjabarkan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029. Tujuan Renstra DPMD Tahun 2025–2029 adalah “Meningkatnya Kemandirian Desa” dengan Sasaran “Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa”. Pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan dengan berbagai strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan. Lebih lanjut, Renstra ini memuat kebijakan dan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan yang

diarahkan untuk pembangunan desa, tata kelola pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat benar-benar memberikan manfaat yang setara bagi perempuan, laki-laki, pemuda, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok miskin, serta kelompok rentan lainnya.

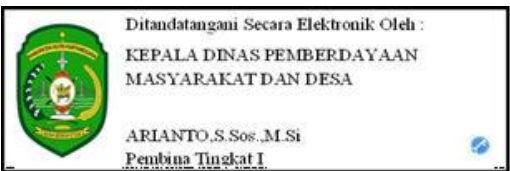
Lebih lanjut, agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Renstra ini juga memuat kebijakan yang mendukung pencapaian Proyek Prioritas Nasional (PPN), khususnya di bidang pembangunan dan pemberdayaan desa, penguatan kelembagaan desa, percepatan pengentasan desa tertinggal, penurunan stunting, serta penguatan ekonomi lokal melalui BUMDesa dan pengembangan desa wisata.

Dalam mengawal pelaksanaan Renstra Dinas PMD Tahun 2025-2029, maka perlu ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

- a. Renstra menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahun, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan RKA SKPD.
- b. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan perencanaan tahunan dalam Renstra Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi tahunan.
- c. Kepala Dinas melakukan evaluasi hasil terhadap Renstra Perangkat Daerah dengan menggunakan hasil Evaluasi Renja.
- d. Evaluasi hasil terhadap Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan minimal satu kali dalam 5 (lima) tahun.
- e. Jika berdasarkan hasil evaluasi perlu dilakukan perubahan Renstra PD, maka akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, tetapi juga memastikan kontribusi nyata dalam pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, provinsi, dan nasional.

Tenggarong, 08 Januari 2026





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wolter Monginsidi Nomor : 01, Telp. (0541) 2090020 - 28 Fax. (0541) 2090029
Website : <http://humas.kutaikartanegarakab.go.id> E-mail: setda@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 4/SK-SEKDA/HK/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2025-2029

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, serta untuk lebih efektifnya proses penyusunan, maka perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan agenda serta jadwal yang ditetapkan;
- b. bahwa telah diusulkan nama yang oleh Perangkat Daerah pengusul mempunyai kemampuan untuk menjadi anggota Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 91 Tahun 2024);
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 45).

Memperhatikan : Telaahan Staf Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : P-7/SET.DPMD/100.3.3.2/01/2025 Tanggal 8 Januari 2025 perihal Pengajuan Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

a. Ketua

1. bertanggung jawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. memberikan arahan dan petunjuk serta Kebijakan Pimpinan kepada Tim dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029;
3. menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim Penyusun kepada Bupati melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; dan
4. bertanggungjawab atas hasil kerja Tim dalam penyusunan Renstra sesuai target waktu yang telah ditetapkan.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



b. Sekretaris

1. mengoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029;
2. membantu ketua dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025- 2029;
3. mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada ketua penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029; dan
4. bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

c. Kelompok Kerja I Pengumpulan Data:

1. melakukan koordinasi dengan Ketua dan Sekretaris terkait data pendukung penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029;
2. melakukan telaah terhadap data-data pendukung penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029;
3. memfasilitasi dan mengoordinir pengumpulan data dukung penyusunan RENSTRA Tahun 2025-2029.

d. Anggota Pokja II Penyusun Materi:

1. mereview hasil evaluasi pelaksanaan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun lalu berdasarkan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah;
2. melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja program/kegiatan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025- 2029;
3. melakukan telaah terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029;
5. merumuskan kegiatan prioritas RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025- 2029;
6. menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas renstra bidangnya masing-masing pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. melaksanakan penyempurnaan renstra dinas pemberdayaan masyarakat dan desa atas hasil telaahan, koreksi dari tim kabupaten melalui Bappeda.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Serifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



- KEEMPAT : Kepada Personil yang menjadi anggota Tim dalam keputusan ini tidak diberikan honorarium sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, serta kriteria lainnya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan;
- KELIMA : Pelaksanaan diktum KEEMPAT tersebut diatas menjadi tanggungjawab pengelola anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025;
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 7 Februari 2025



- Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
 2. Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
 3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
 5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
 6. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 4/SK-SEKDA/HK/2025 TANGGAL 7 FEBRUARI 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2025-2029

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Ketua

: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- II. Sekretaris

: Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- III. Kelompok Kerja

Pokja I Pengumpulan Data Koordinator

: Ahmad Irji'i, SE, M.Si
NIP. 196812022006011008)
(Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya)
- Anggota

:

1. Julpiansyah, S.Sos,M.Si
NIP. 197409012007011015
(Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)

2. Kartika Sari, A.Ma.Pd
NIP. 197205191993062001
(Kepala Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa)

3. Hj. Anita Hefiana, S.Sos, M.Si
NIP. 197403042000122002
(Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)

4. Heriansyah, SH
NIP. 197606162001121003
(Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)

5. Hendra Madan,SE
NIP. 197709031998031002
(Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan dan Desa)

6. Samsul Dafik, S.Sos
NIP. 197312311998031017
(Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda)



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



IV. Pokja II Penyusunan Materi
Koordinator

: Lilis Suriani, S.Sos, M.Si
NIP. 197705102000122005
(Perencana Ahli Muda)

Anggota

1. Kepala Bidang Penataan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Kepala Bidang Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Enny Noor Afiani, S.Sos
NIP. 198406162008012010
(Pelaksana Analis Keuangan)

